

Ruang, Gender dan Kualitas Hidup Manusia: Sebuah studi Gender pada komunitas perantau dan pengelola kebun di Jawa Barat

Elok Mulyoutami, Desi Awalina, Eva Fauziyah,
Tri Sulistyati Widyaningsih, Betha Lusiana

Ruang, Gender dan Kualitas Hidup Manusia:
Sebuah studi Gender pada komunitas
perantau dan pengelola kebun
di Jawa Barat

Elok Mulyoutami, Desi Awalina, Eva Fauziah, Tri Sulistyati Widyaningsih,
Betha Lusiana

Working Paper No. 243



Correct citation:

Mulyoutami E, Awalina D, Fauziyah E, Widyaningsih TS, Lusiana B. 2016. *Ruang, Gender dan Kualitas Hidup Manusia: Sebuah studi Gender pada komunitas perantau dan pengelola kebun di Jawa Barat*. Working Paper no. 243. Bogor, Indonesia. World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Program. 46p. DOI: <http://dx.doi.org/10.5716/WP16159.PDF>

Titles in the Working Paper Series aim to disseminate interim results on agroforestry research and practices and stimulate feedback from the scientific community. Other publication series from the World Agroforestry Centre include: Technical Manuals, Occasional Papers and the Trees for Change Series.

Published by the World Agroforestry Centre (ICRAF)
Southeast Asia Regional Program
PO Box 161, Bogor 16001
Indonesia

Tel: +62 251 8625415
Fax: +62 251 8625416
Email: icraf-indonesia@cgiar.org
Website: <http://www.worldagroforestry.org/region/southeast-asia>

© World Agroforestry Centre 2016

Working Paper 243

Photos:

The views expressed in this publication are those of the author(s) and not necessarily those of the World Agroforestry Centre.

Articles appearing in this publication may be quoted or reproduced without charge, provided the source is acknowledged.

All images remain the sole property of their source and may not be used for any purpose without written permission of the source.

About the authors

Elok Mulyoutami mulai bergabung sebagai peneliti di ICRAF sejak tahun 2003. Dengan latar belakang sarjana ilmu Antropologi dari Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia dan master sains dalam ilmu Sosiologi Pedesaan, Institut Pertanian Bogor, Elok menjadi peneliti yang fokus pada isu Gender, Pengetahuan Lokal, dan Migrasi.

Desi Awalina, asisten peneliti dalam kajian gender dan migrasi, mulai bergabung sejak November 2013. Gelar sarjana diperolehnya dari Jurusan Kimia, Fakultas MIPA, IPB.

Eva Fauziyah, peneliti madya bidang sosiologi kehutanan, mulai bergabung di Balai Penelitian Teknologi Agroforestry sejak tahun 2003. Latar belakang pendidikannya adalah sarjana kehutanan dari Jurusan Manajemen Hutan, IPB tahun 2003 dan master Ilmu Kehutanan, UGM tahun 2009.

Tri Sulistyati Widyaningsih, peneliti muda bidang sosiologi kehutanan, mulai bergabung di Balai Penelitian Teknologi Agroforestry sejak tahun 2005. Gelar sarjana diperoleh dari Jurusan Sosiologi UGM pada tahun 2003 dan gelar master dari Program Studi Ilmu Kehutanan UGM pada tahun 2009.

Betha Lusiana, peneliti di ICRAF dengan latar belakang sarjana dan master sains di bidang Statistika dari Institut Pertanian Bogor dan doktor di bidang pemodelan dan pengelolaan sumber daya alam dari Hohenheim Universitaet, Jerman. Topik penelitian yang dikaji terkait penilaian tarik-ulur (*trade-offs*) antara pembangunan pertanian, taraf hidup petani dan jasa lingkungan. Topik ini sangat erat kaitannya dengan isu gender dan migrasi di kalangan petani.

Abstract

Merantau merupakan salah satu strategi peningkatan sumber penghidupan masyarakat bilamana sumber pendapatan terbatas. Pada masyarakat agraris, merantau juga merupakan suatu strategi untuk meluaskan areal garapan. Kajian ini mencoba melihat bagaimana pola pengetahuan yang terbentuk dari preferensi dan pengalaman perempuan dan laki-laki di dalam lahan yang kemudian menentukan di ruang mana mereka lebih banyak berkiprah. Kajian dilakukan di Kecamatan Rajadesa dan Panjalu Ciamis, Jawa Barat di dua kecamatan yang sebagian masyarakatnya merantau untuk bekerja di sektor pertanian (Kecamatan Rajadesa) maupun di sektor non-pertanian (Kecamatan Panjalu). Studi menunjukkan adanya pembagian ruang yang jelas bagi laki-laki dan perempuan untuk lebih berkiprah. Pembagian ini dipengaruhi oleh tanggung jawab di rumah, tanggung jawab di masyarakat, keamanan, jarak tempat bekerja dengan rumah, serta kondisi fisik. Faktor fisik menjadi pertimbangan utama baik bagi perempuan maupun laki-laki. Selanjutnya tanggungjawab menjadi penentu lokasi kegiatan mereka, bagi perempuan tanggung jawab domestik lebih penting sedangkan bagi laki-laki tanggung jawab komunitas lebih utama. Faktor keamanan dan jarak menjadi faktor berikutnya. Area di sekitar rumah seperti pekarangan, menjadi domain perempuan. Kebun kayu dan kopi merupakan domain laki-laki. Laki-laki cenderung untuk mengubah lahan yang produktif untuk lebih ditingkatkan produksinya, sementara perempuan cenderung untuk mengubah lahan yang kurang produktif seperti pekarangan dan kebun kelapa. Sawah, kolam ikan, pekarangan merupakan tipe penggunaan lahan yang dipertahankan keberadaannya. Selain karena tidak mudah mengubah ke bentuk lain juga karena manfaatnya yang besar untuk bahan pangan sehari-hari. Perempuan memiliki kecenderungan lebih positif dalam memandang masa depan dan menerima kehidupannya. Sementara laki-laki nampak lebih banyak menilai dan ingin mengubah apa yang mereka alami dan hadapi. Hal ini hampir sama dengan pandangan perempuan yang melihat sesuatu dari jangka pendek, selama kebutuhannya saat ini terpenuhi, maka mereka sudah memandang kehidupannya secara positif. Sedangkan laki-laki harus menanggung anak dan istrinya sehingga memiliki pemikiran yang lebih jauh ke depan. Perbedaan sudut pandang ini yang menentukan strategi dalam menghadapi hidup yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, dan tentu saja bersifat komplementer. Berdasarkan data BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kabupaten Ciamis mempunyai selisih yang besar antara nilai Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pemberdayaan Gender yang menunjukkan timpangnya pemberdayaan di bidang perempuan. Rekomendasi selanjutnya adalah perlu adanya penguatan hak perempuan atas lahan dan memperbesar penghargaan terhadap kontribusi perempuan dalam ekonomi rumah tangga

Keywords

Studi gender, merantau, remitansi, pertanian kebun, Ciamis, Jawa Barat

Ucapan terima kasih

Ucapan terimakasih diberikan kepada Delia Catacutan dan Farhat Naz sebagai perwakilan dari Gender Cross Cutting team di ICRAF Global, yang telah memberikan dana penelitian ini. Apresiasi untuk kerjasama yang erat dari BPTA Ciamis yang telah mengirimkan team solid (Devy Priyambodo, Dian Diniyati, Maria Palmolina dan Eyet Mulyati) serta team enumerator dari ICRAF (Randy Savaringga dan Ilyas) atas kontribusi positif dalam pengambilan data lapangan. Dan juga kepada Sebastian de Royer yang telah terlibat secara aktif dalam kegiatan pengambilan data. Penghargaan kepada Anisa Erawati untuk dukungan administrasi dan team DTP untuk publikasi working paper ini. Terimakasih tak terhingga kepada para tokoh di masing-masing desa penelitian yang telah memungkinkan team peneliti untuk berkunjung dan bermalam di setiap desa.

Daftar Isi

1. Pendahuluan.....	1
2. Konsep dan metodologi	2
2.1 Beberapa konsep yang digunakan	2
2.2 Lokasi penelitian.....	3
2.3 Pengumpulan dan analisis data.....	4
2.4 Alur penulisan.....	5
3. Sketsa umum lokasi penelitian.....	5
3.1 Demografi penduduk	7
3.2 Latar belakang sosial dan budaya masyarakat.....	7
3.3 Penghidupan masyarakat dan pola pemanfaatan lahan.....	8
3.4 Pola migrasi-keluar (merantau)	10
3.5 Struktur kepemilikan lahan.....	12
4. Perbedaan peran gender	13
5. Gender dan ruang.....	15
5.2 Faktor-faktor yang menentukan ruang yang dipilih	18
5.3 Preferensi gender terhadap lahan – AHP.....	19
6. Sumber daya dan kesejahteraan manusia.....	23
6.1 Disparitas gender dalam kualitas pembangunan.....	23
6.2 Ukuran kualitas hidup dan kondisi saat ini.....	25
6.3 Penilaian petani atas kondisi saat ini	28
7. Perempuan dan laki-laki: ketimpangan vs kesejahteraan?.....	36
7.1 Merantau sebagai alternatif penghidupan.....	36
7.2 Lahan sebagai simbol kesejahteraan (<i>well-being</i>)	38
7.3 Kontribusi perempuan dalam pendapatan rumah tangga: tidak tampak atau tidak diperhitungkan	39
7.4 Siapa lebih sejahtera?	39
8. Perempuan dan laki-laki: pengetahuan dan pembagian ruang gender	41
9. Upaya ke depan.....	43
Referensi	44

Daftar Tabel

Tabel 1 Gambaran umum lokasi penelitian	6
Tabel 2 Struktur kepemilikan lahan untuk setiap tipe penggunaan lahan dalam rumah tangga petani.....	12
Tabel 3 Bukti legalitas untuk lahan yang dimiliki rumah tangga petani.....	13
Tabel 4 Lamanya masa sekolah dan hasil uji statistik	29
Tabel 5 Kontribusi perempuan, laki-laki dan bersama (laki-laki dan perempuan) di dalam pendapatan rumah tangga per-tipologi masyarakat	35
Tabel 6 Kontribusi perempuan, laki-laki dan bersama dalam setiap struktur pendapatan rumah tangga.....	35

Daftar Gambar

Gambar 1. Lokasi penelitian di Kabupaten Ciamis, Propinsi Jawa Barat, Indonesia	6
Gambar 2. Sumber penghidupan masyarakat untuk setiap periode waktu (per 10 tahun)	9
Gambar 3. Peran perempuan dan laki-laki di lahan berbasis tanaman kayu	15
Gambar 4. Peran perempuan dan laki-laki di lahan berbasis tanaman non kayu	15
Gambar 5. Pola ruang antar gender dan antar kelompok masyarakat dilihat dari 3 kondisi: kerapatan pohon, jarak dari tempat tinggal, dan tingkat keamanan	17
Gambar 6. Faktor-faktor yang menentukan pemilihan ruang bagi setiap kelompok gender. Angka dalam grafik menunjukkan persentase responden.....	19
Gambar 7. Preferensi lahan antar kelompok gender di lokasi penelitian di Kabupaten Ciamis, garis 1: 1 menunjukkan persepsi perempuan yang persis sama dengan persepsi laki-laki, dan huruf pada gambar menunjukkan tipe penggunaan lahan: Sw=sawah,Kp=kopi, Kl=kelapa, Pk=pekarangan, Ky=kebun kayu, KC=kebun campur,Ka=kapulaga, Ke=kelapa, Rp=rpadang rumput, Bl=belukar dan Ht=areal berhutan.....	20
Gambar 8. Preferensi lahan yang akan dikonversi per-kelompok gender dalam tipologi perantau (<i>out-migrant</i>) dan bukan-perantau, garis 1: 1 menunjukkan persepsi perempuan yang persis sama dengan persepsi laki-laki, dan huruf pada gambar menunjukkan tipe penggunaan lahan: Sw=sawah,Kp=kopi, Kl=kelapa, Pk=pekarangan, Ky=kebun kayu, KC=kebun campur,Ka=kapulaga, Ke=kelapa, Rp=rpadang rumput, Bl=belukar dan Ht=areal berhutan	21
Gambar 9. Penilaian disparitas gender melalui IPM, IPG, dan IDG di Provinsi Jawa Barat. Sumber data dari BPS dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2012.	25
Gambar 10. Faktor yang menentukan ukuran kualitas hidup manusia yang subyektif.....	26
Gambar 11. Persepsi masyarakat atas kondisi kualitas hidup pada masing-masing ukuran kualitas hidup subyektif yang utama	28
Gambar 12. Lama masa sekolah untuk setiap kategori umur di masing-masing Kecamatan	30
Gambar 13. Persentase anggota rumah tangga responden yang mengakses sarana kesehatan satu tahun terakhir berdasarkan kelompok umur.....	31

Akronim

BPN	Badan Pertanahan Negara/ <i>State Land Agency</i>
BRN	Biro Rekonstruksi Nasional/ <i>National Reconstruction Bureau</i>
<i>FGD</i>	<i>Focus Group Discussion</i> /Diskusi kelompok terfokus
IDG (<i>GEI</i>)	Indeks Pemberdayaan Gender (<i>Gender Empowerment Index</i>)
IPG (<i>GDI</i>)	Indeks Pembangunan Gender (<i>Gender Development Index</i>)
IPM (HDI)	Indeks Pembangunan Manusia (<i>Human Development Index</i>)
PHBM	Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat/ <i>Community Based Forest Management</i>
TKI	Tenaga Kerja Indonesia/ <i>Indonesian Labour Force</i>

1. Pendahuluan

Merantau merupakan salah satu strategi peningkatan sumber penghidupan masyarakat bilamana sumber pendapatan mereka semakin terbatas (Ellis 2003, Dharmawan 2006, de Haas 2008). Pada masyarakat agraris, seperti sebagian besar masyarakat di Indonesia, strategi ini dilakukan bila hasil dari kebun atau lahan pertanian mereka sudah semakin menurun, atau pilihan berkebun dan atau bertani ini sudah tidak lagi dapat mereka lakukan dengan semakin terbatasnya lahan yang dapat mereka akses (Mulyoutami dkk 2014c). Selain itu, merantau juga merupakan suatu strategi untuk meluaskan areal garapan mereka saat lahan di desa mereka sudah tidak lagi menjadi pilihan yang menarik misalnya karena kurang subur.

Keputusan merantau memang tampaknya merupakan keputusan individu, namun sejatinya keluarga sangat berperan besar dalam pengambilan keputusan tersebut. Adapun perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah merantau juga sangat mempengaruhi pola dan hubungan gender dalam rumah tangga perantau (Mulyoutami dkk 2014a). Tidak hanya itu, keputusan merantau memiliki dampak terhadap kehidupan di masyarakat serta juga perubahan tata guna lahan yang terdapat di masyarakat tersebut, terutama pada komunitas yang hidupnya bergantung pada lahan. Hal ini juga memiliki pengaruh baik langsung dan tak langsung dengan masyarakat yang tidak merantau dan lebih memilih tetap mengelola kebun mereka (non-perantau). Memahami dinamika yang terjadi di suatu masyarakat dimana terdapat komunitas perantau dan pengelola kebun merupakan hal yang cukup penting untuk menggambarkan dampak dari proses migrasi-keluar atau merantau, terutama yang berkaitan dengan pola hubungan para pelaku dan non pelaku, serta juga perubahan tatanan lahan yang merupakan sumber penghidupan utama mereka. Baik langsung maupun tidak langsung, kita dapat melihat apakah keputusan melakukan migrasi-keluar memiliki dampak terhadap perubahan pola kebun dan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat. Hal yang tak kalah penting adalah melihat bagaimana aktivitas merantau ini berkontribusi terhadap pola hubungan gender dalam rumah tangga petani dan masyarakat yang lebih luas yang dapat berpengaruh terhadap kesetaraan dan ketidaksetaraan gender.

Kajian ini mencoba melihat bagaimana pola pengetahuan yang terbentuk dari preferensi dan pengalaman perempuan dan laki-laki di dalam lahan yang kemudian menentukan di ruang mana mereka lebih banyak berkiprah. Hubungan antara perempuan dan laki-laki digambarkan sebagai pola hubungan yang terbentuk secara struktural dalam budaya masyarakat (Rocheleau dan Edmunds 2007, Krishna 2004, Trauger 2004). Meski secara keseluruhan, dalam pengelolaan lahan dan kebun agroforest serta di rumah tangga, perempuan dan laki-laki saling melengkapi satu sama lain (Colfer dkk 2014, Kiptot dan Frenzel 2012) melalui pembagian kerja, namun di beberapa titik terdapat beberapa kondisi dimana celah antara perempuan dan laki-laki lebih dalam, yang terutama terjadi pada masyarakat miskin. Kajian ini menekankan bahwa hubungan perempuan dan laki-laki dan upaya mengurangi ketimpangan yang terjadi bersifat kontekstual dan situasional, tidak dapat dibuat universal.

Kualitas hidup manusia yang direpresentasikan dalam istilah kesejahteraan atau *well-being* dilihat dari perspektif subyektif dan obyektif untuk memberikan gambaran kondisi kehidupan yang lebih realistis (Costanza dkk 2011,) dengan menggunakan ukuran yang bersifat multidimensi (Alkire dan Sawar 2009, Berenger dan Verdier-Cauchane 2007). Costanza dkk (2011) menyebutkan bahwa kombinasi perspektif dan subyektif yang multidimensi penting dalam interpretasi pola dan hubungan dalam mengakses sumber daya, dan perbedaan di dalam komunitas yang merefleksikan adanya beragam kebutuhan didalamnya. Gambaran ini dapat membantu menjelaskan mengenai celah atau gap yang terjadi antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan (Gartaula dkk 2011) manusia seperti pendapatan, pendidikan, kesehatan dan lingkungan.

Secara ringkas, kegiatan penelitian ini dilakukan untuk:

1. Eksplorasi perbedaan peran dan tanggung jawab gender pada komunitas perantau dan pengelola kebun (non perantau) di daerah peri-urban
2. Melihat hubungan gender dengan lahan, dalam kaitannya dengan gender dan ruang serta bagaimana perbedaan preferensi gender atas lahan
3. Mengidentifikasi indikator kualitas hidup manusia dan bagaimana mereka menilai kualitas hidup mereka (sudut pandang subyektif) di komunitas perantau dan pengelola kebun (non perantau) di daerah peri-urban.

2. Konsep dan metodologi

Studi ini merupakan sebuah studi eksploratif yang berusaha mengungkap bagaimana pola kehidupan komunitas perantau dan komunitas pengelola kebun di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Dengan menggunakan isu gender sebagai basis analisis, penelitian ini berupaya untuk melihat bagaimana kehidupan perempuan dan laki-laki dalam kedua komunitas tersebut, status kesejahteraan mereka dalam kaitannya dengan kegiatan mereka dalam mengelola lahan dan kebun mereka. Dalam upaya untuk menggambarkan perbedaan kehidupan yang memilah gender, pendekatan kualitatif diterapkan untuk menjelaskan secara lebih dalam dan menyeluruh (holistik) tentang fenomena ini. Pendekatan kuantitatif dan beberapa uji statistik sederhana dilakukan untuk menjelaskan secara lebih detail tentang perbedaan persepsi dan kondisi antara perempuan dan laki-laki, sekaligus untuk membantu membuat visualisasi dari data yang dikumpulkan.

2.1 Beberapa konsep yang digunakan

Istilah merantau dan komutasi dalam tulisan ini merujuk definisi yang dikemukakan oleh Abustam (1989) dalam studinya di tiga komunitas pedesaan di Sulawesi Selatan. Terminologi merantau merujuk pada kegiatan migrasi-keluar komunitas di desa ini yang bersifat semi permanen, dengan tujuan tetap dan frekuensi kunjungan tetap (lebih dari 1 bulan). Merantau merupakan kegiatan yang dilakukan oleh komunitas di kedua kecamatan ini saat mereka pergi ke kota di Jawa Barat dan Jakarta

dan ke Lampung. Merantau juga digunakan untuk migrasi-keluar yang menetap yang lebih dari 1 tahun.

Istilah komutasi merujuk kepada kunjungan yang kurang dari 1 bulan, dan bahkan bisa berlangsung secara harian. Istilah komutasi banyak digunakan untuk menggambarkan gerak penduduk yang mengelola lahan kopi di beberapa daerah di sekitarnya dengan memanfaatkan skema PHBM serta bagi mereka yang secara rutin merawat lahannya yang berada di luar desa.

Perantau atau *out-migrant* merupakan konsep yang digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang melakukan kegiatan merantau. Non-migran atau bukan-perantau atau *stayer* merupakan istilah yang digunakan untuk mengilustrasikan orang-orang yang memilih tidak merantau atau menetap di desa. Untuk istilah perantau, studi ini melihat dua konsep yang berbeda. Perantau non pertanian adalah tipe perantau yang berbasis pada kegiatan yang bersifat non pertanian. Perantau berbasis pertanian/perkebunan adalah perantau dengan sumber penghidupan di perantauannya adalah berkebun dan bertani.

Dalam survey rumah tangga, responden dibedakan menjadi 'responden sebagai perantau', dan 'responden sebagai bagian rumah tangga perantau', serta 'responden yang merupakan rumah tangga' yang tidak melakukan migrasi-keluar (bukan-perantau).

Selanjutnya, konsep mengenai status sosial ekonomi. Studi ini melihat status sosial ekonomi dari dua lapisan, yaitu lapisan menengah bawah serta menengah atas. Lapisan ekonomi menengah ke bawah adalah lapisan ekonomi yang memiliki modal ekonomi rendah dan skill terbatas. Lapisan ekonomi menengah ke atas adalah kelompok yang mampu mengakumulasi modal dan memiliki peluang lebih tinggi dalam mencari alternatif sumber penghidupan.

Komunitas perantau dan pengelola kebun yang menjadi fokus dalam penelitian ini berada di wilayah peri-urban atau peri-rural di dua kecamatan di Kabupaten Ciamis. Istilah peri-urban merujuk pada definisi desa yang memiliki karakteristik post-perdesaan sebagaimana dijelaskan oleh Iaquina dan Drescher (2000). Pengertian ini lebih merujuk kepada perubahan sosial-psikologis, dimana secara geografi letak desanya cukup jauh dari perkotaan namun sudah memiliki kesadaran seperti kota. Hal ini terutama dipengaruhi karena adanya arus remiten dan migrasi-keluar, pengaruh dari migrasi-keluar ke perkotaan terhadap model perilaku masyarakat dan sumber daya non ekonomi lainnya.

2.2 Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di dua desa di Kecamatan Panjalu dan dua desa di Kecamatan Rajadesa (Gambar 1). Kedua kecamatan tersebut merupakan bagian dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kecamatan Panjalu merupakan wilayah yang terbentang di arah Barat Laut dari Kota Ciamis, sebagai ibukota Kabupaten Ciamis. Kecamatan Rajadesa, letaknya agak lebih ke timur. Kedua kecamatan ini merupakan kecamatan yang sebagian penduduknya adalah masyarakat agraris yang kehidupannya bersandar pada aktivitas pertanian dan perkebunan.

2.3 Pengumpulan dan analisis data

Sebagai sebuah kajian yang bersifat eksploratif, pengumpulan data menggunakan pendekatan kualitatif dilakukan melalui diskusi kelompok terfokus dan wawancara mendalam. Survey rumah tangga dilakukan untuk menambah informasi dan analisis statistik deskriptif guna mendefinisikan tipologi masyarakat dan memetakan status sosial ekonomi masyarakat di desa kajian. Analisis statistik ini diterapkan untuk menjelaskan beberapa hubungan antar variabel dalam masyarakat, perbedaan antara laki-laki dan perempuan, serta beberapa perbedaan antara kelompok perantau dan *stayer*/bukan-perantau (yang merupakan pengelola kebun).

Diskusi kelompok terfokus dilakukan bersama perwakilan komunitas perantau dan bukan-perantau di masing-masing desa, dan dilakukan terpisah gender dengan menggunakan set pertanyaan yang sama. Jadi, diskusi dilakukan secara paralel dalam 4 kelompok yang berbeda yang meliputi komunitas perantau perempuan, komunitas perantau laki-laki, komunitas bukan-perantau perempuan dan komunitas bukan-perantau laki-laki. Satu kelompok diskusi lainnya dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum dan informasi dasar untuk setiap lokasi penelitian. Jadi jumlah total diskusi per-desa adalah 5 kelompok diskusi. Kegiatan diskusi ini dilakukan selama sehari penuh dengan jumlah peserta yang dibatasi tidak lebih dari 10 orang per-kelompok diskusi. Rata-rata kehadiran peserta tiap kelompok sekitar 6 – 8 orang.

Dalam diskusi kelompok ini terdapat tiga pola pengambilan data yang diterapkan, yang pertama adalah analisis ranking, diskusi proses hirarki, dan yang terakhir adalah wawancara berkelompok. Analisis ranking merupakan sebuah metode diskusi dengan alat bantu kancing atau biji dengan jumlah tertentu (studi ini menggunakan 100 buah kancing) (Mulyoutami dkk 2014b). Metode yang kedua adalah analisis proses hirarkis sebagaimana pernah diterapkan oleh Janudianto dkk (2014). Peserta diskusi diminta mendiskusikan preferensi mereka terhadap lahan dan jenis tanaman serta berbagai faktor yang mendasarinya. Pola wawancara berkelompok dilakukan terutama pada kelompok diskusi untuk memperoleh gambaran umum dan sejarah desa.

Survey rumah tangga dilakukan dengan jumlah responden berkisar antara 25 – 30 orang komunitas perantau dan 25 – 30 orang komunitas bukan-perantau pada masing-masing desa. Total responden yang diwawancara dalam studi ini sekitar 120 orang. Sekira 1 – 4 orang informan kunci di masing-masing desa diwawancara secara mendalam untuk mendapatkan ilustrasi aktivitas merantau dari dulu hingga saat ini dan sejarah munculnya kegiatan merantau di desa.

Data primer yang telah dikumpulkan baik dari diskusi kelompok maupun survey rumah tangga dianalisis menggunakan statistik deskriptif sesuai keperluan dan tipe data yang diperoleh.

Perbandingan antara perempuan dan laki-laki dilakukan menggunakan analisis non parametrik Mann-Whitney untuk memastikan distribusi data yang baik. PCA atau *principal component analysis* diterapkan untuk mengelompokkan data yang dalam jumlah besar terutama data yang berhubungan dengan persepsi dan pengambilan keputusan.

Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber diantaranya Kecamatan Dalam Angka dan Badan Pusat Statistik, terutama yang berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan

Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender. Data-data ini disusun untuk memberikan ilustrasi mengenai disparitas gender yang terdapat di tingkat kabupaten maupun propinsi.

2.4 Alur penulisan

Secara sederhana, tulisan ini melihat tiga aspek besar dalam kedua komunitas yang diamati, yaitu komunitas perantau dan komunitas bukan-perantau yang mengelola kebun. Aspek yang pertama adalah bagaimana pembagian peran antar gender pada masing-masing komunitas (Bagian 4). Yang kedua, pola pemanfaatan ruang oleh masing-masing kelompok gender serta berbagai hal yang menentukan bagaimana mereka memanfaatkan ruang tersebut (Bagian 5). Aspek terakhir mengenai kondisi kesejahteraan masing-masing kelompok gender dilihat dari sumber daya yang ada (Bagian 6).

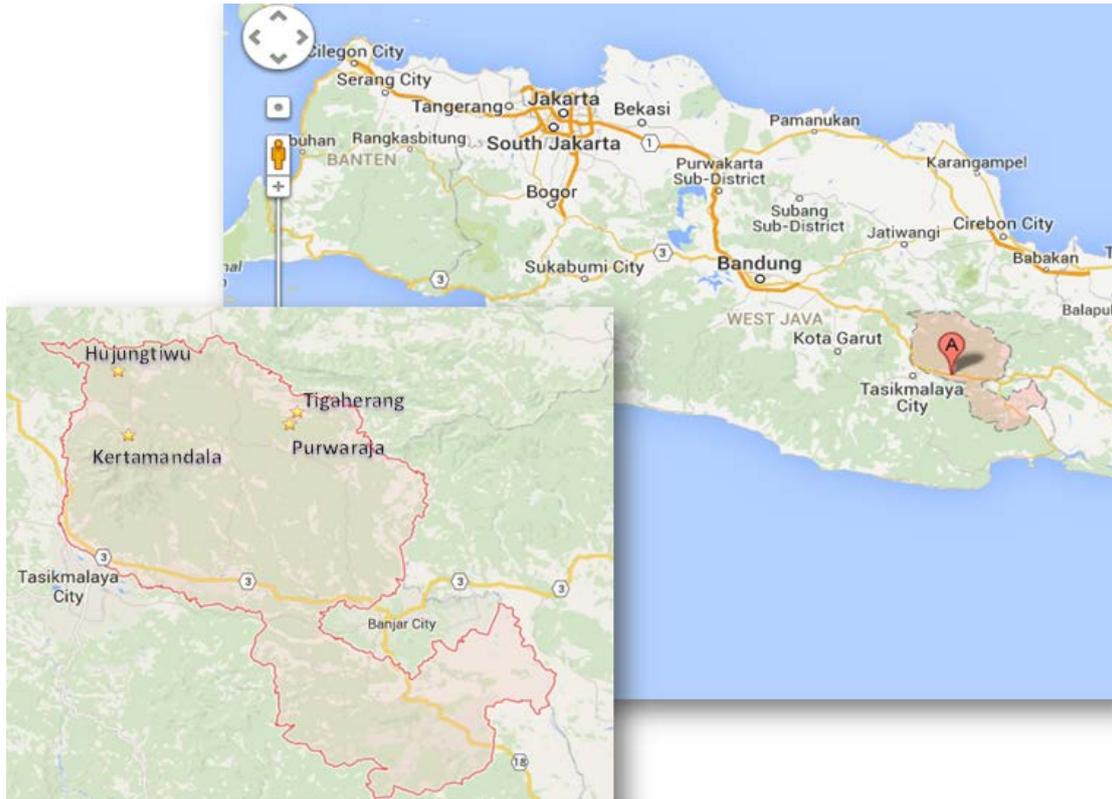
Ketiga aspek tersebut menjadi bahan diskusi untuk Bagian 7 yang membahas bagaimana perbedaan kondisi kesejahteraan antar gender serta dengan ketimpangan yang terjadi diantara dua kelompok gender. Bagian 8 membahas mengenai bagaimana peta pengetahuan antara perempuan dan laki-laki yang kemudian menentukan pembagian ruang dalam mengelola kebun dan merantau.

3. Sketsa umum lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di desa Hujung Tiwu dan Kertamandala di Kecamatan Panjalu, serta desa Purwaraja dan Tigaherang di Kecamatan Rajadesa. Desa Hujung Tiwu dan Desa Kertamandala (Kecamatan Panjalu) merupakan desa yang memiliki sumberdaya lingkungan dengan ketersediaan tanah yang cukup luas, sebagian dimiliki oleh orang non desa, sehingga kepemilikan lahan di desa ini sangat beragam, mulai dari yang memiliki lahan sangat luas hingga yang sama sekali tidak memiliki lahan. Desa Purwaraja dan Desa Tigaherang merupakan desa di Kecamatan Rajadesa yang memiliki karakteristik desa yang memiliki sumber daya lahan lebih terbatas, dengan kepemilikan lahan rendah, hampir merata semua masyarakat memiliki lahan meskipun ukurannya kecil.

Keempat desa penelitian memiliki tingkat gerak penduduk dari rendah ke tinggi, namun dengan model dan pola gerak yang berbeda satu sama lain. Di Panjalu, penduduknya banyak merantau ke kota dengan sumber penghidupannya sebagai penjual barang rongsokan, baik sebagai pengusaha maupun sebagai karyawan usaha. Daerah yang menjadi tujuan merantaunya adalah kota besar seperti Bandung, Tasikmalaya dan Jakarta. Di Kecamatan ini, tipe migrasi-keluar ini disebut sebagai perantau non pertanian.

Di Rajadesa, meski ada sebagian orang lebih memilih merantau ke kota besar, namun sebagian besar masyarakatnya merantau ke daerah pedesaan lainnya yang memiliki potensi lahan garapan. Adapun lahan tersebut ada yang lokasinya dekat dengan desa mereka, yaitu di Kecamatan tetangga mereka, Panjalu, dan ada pula yang lokasinya cukup jauh, seperti di sekitar Tasikmalaya, Jawa Tengah, dan yang paling jauh adalah Lampung, khususnya di daerah Sumber Jaya dan Way Tenong. Pilihan mata pencarian utama mereka di daerah lain adalah berkebun kopi, dan sebagian kecil lainnya berjualan. Di kecamatan ini, komunitas perantau non pertanian memiliki komposisi terbesar (lebih kurang 60%).



Gambar 1. Lokasi penelitian di Kabupaten Ciamis, Propinsi Jawa Barat, Indonesia

Tabel 1. Gambaran umum lokasi penelitian

Kecamatan	Panjalu		Rajadesa	
Desa	Hujungtiwu	Kertamandala	Purwaraja	Tigaherang
Area (ha)	714	433	379	660
Ketinggian(m dpl)	800-850	600	700	600
Lahan padi (Ha)	79	136	91	294
Kebun (Ha)	384,8	235,6	410	362
Kepemilikan lahan kebun (Ha)	0.07 – 2 Rata-rata 0.24	0.14 – 3 Rata-rata 0.3	0.14 - 2 Rata-rata 0.22	0.05 – 2 Rata-rata 0.28
Hutan negara	Tidak ada	Perhutani/ Suaka Margasatwa Gunung Sawal	Tidak ada	Tidak ada
Laju migrasi-keluar	Tinggi (70%)	Medium (40 %)	Tinggi (60–70%)	Tinggi (60–80%)
Jumlah penduduk (jiwa)	4 865	4 245	3 719	5 843
Kepadatan penduduk (jiwa/km2)	681	980	981	885

Sumber: Rangkuman berbagai sumber, potensi desa, kecamatan dalam angka, observasi dan diskusi

3.1 Demografi penduduk

Tabel 1 menunjukkan relatif tingginya angka kepadatan penduduk di masing-masing desa penelitian. Hujung tiwu merupakan desa dengan kepadatan penduduk terendah, dengan luasan areal yang terbesar dibandingkan desa lainnya. Laju migrasi-keluar di desa ini dikategorikan cukup tinggi, sementara Kertamandala dikategorikan menengah.

Tingginya jumlah dan laju peningkatan jumlah penduduk di semua desa terutama disebabkan oleh kelahiran, bukan karena migrasi-masuk. Data BPS 2013 menunjukkan tingkat migrasi-masuk hanya separuh dari tingkat kelahiran, dan data dari diskusi kelompok menunjukkan tingkat migrasi-masuk di tahun 2000, 1990, 1980, dan 1970 yang selalu lebih rendah dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk tingkat kelahiran, data diskusi menunjukkan di beberapa tahun sebelum 2013 (saat ini), ada beberapa tingkat kelahiran yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Terlihat jelas bahwa peningkatan jumlah penduduk, bukan karena migran yang masuk ke desa. Sedikitnya jumlah etnis non sunda yang berada di desa juga menunjukkan bahwa migrasi-masuk ke desa-desa yang menjadi lokasi penelitian cukup rendah.

Tingkat migrasi-keluar di desa Kertamandala menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi dari tahun ke tahun, sedangkan di Hujungtiwu cenderung stabil. Tingkat migrasi-keluar di Kertamandala jauh nampak lebih tinggi dibandingkan yang lain, meski ada kemungkinan terjadi over estimasi dari peserta diskusi. Data ini tidak dapat menunjukkan perbedaan besar migrasi-keluar antara Kertamandala dengan Hujungtiwu. Namun secara keseluruhan, tren yang ada menggambarkan perubahan tingkat migrasi-keluar dari tahun ke tahun. Tingkat migrasi-keluar yang tinggi di Hujungtiwu terutama terjadi di tahun 1970, dimana terjadi perpindahan ke daerah Bandung dan sekitarnya yang mengawali usaha rongsokan besi.

Di Kecamatan Rajadesa, migrasi-keluar cenderung naik dari periode ke periode meski tidak setajam seperti wilayah Kecamatan Panjalu. Migrasi-keluar di Rajadesa umumnya bersifat komutasi, artinya pada periode tertentu saja mereka bekerja di daerah lain, namun tetap kembali (Mulyoutami dkk 2014a, Fauziyah dkk 2015). Berbeda dengan pola migrasi-keluar atau merantau yang terdapat di Panjalu, dimana sebagian dari mereka menetap di kota dan hanya kembali ke desa satu tahun sekali untuk menjenguk kampung halamannya.

Tingginya kepadatan penduduk, infrastruktur yang meliputi fasilitas kesehatan dan pendidikan yang sudah cukup lengkap, serta aksesibilitas tinggi ke dalam dan ke luar desa menjadi faktor pertimbangan bahwa desa-desa tersebut dikategorikan sebagai peri-urban sebagaimana dijelaskan dalam Iaquina dan Drescher (2006).

3.2 Latar belakang sosial dan budaya masyarakat

Komunitas perantau dan bukan-perantau yang berada di Kabupaten Ciamis sebagian besar merupakan bagian dari etnis Sunda. Hanya sekitar 3 – 4 % yang merupakan etnis Jawa, dan etnis lain. Hampir 95% dari keseluruhan komunitas beragama Islam.

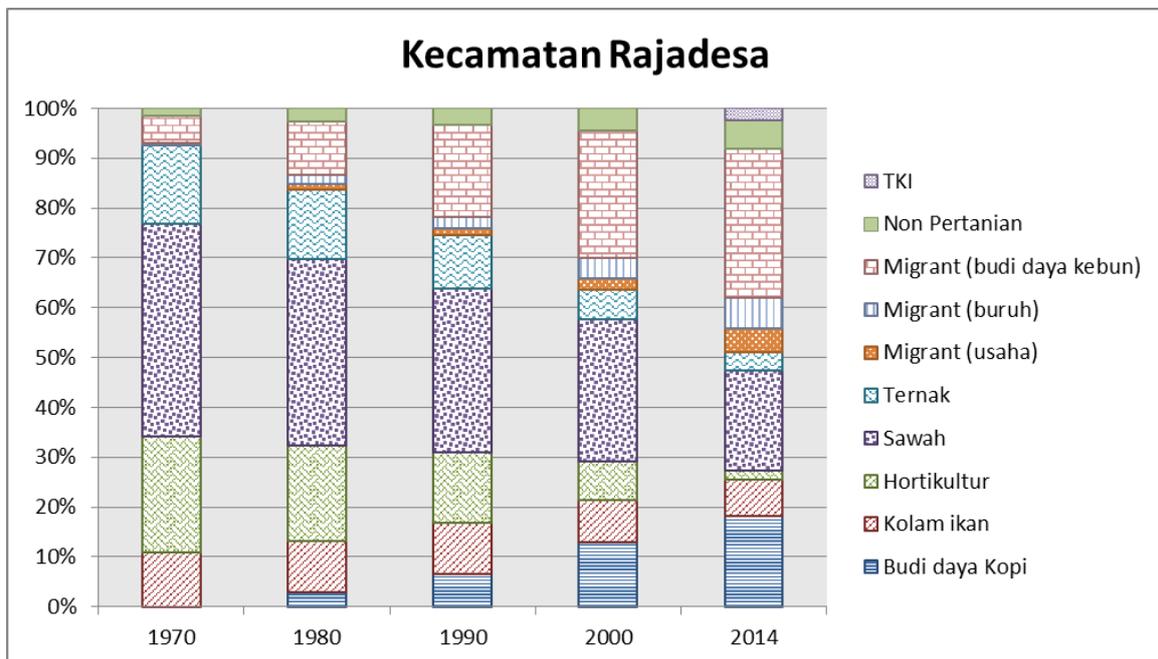
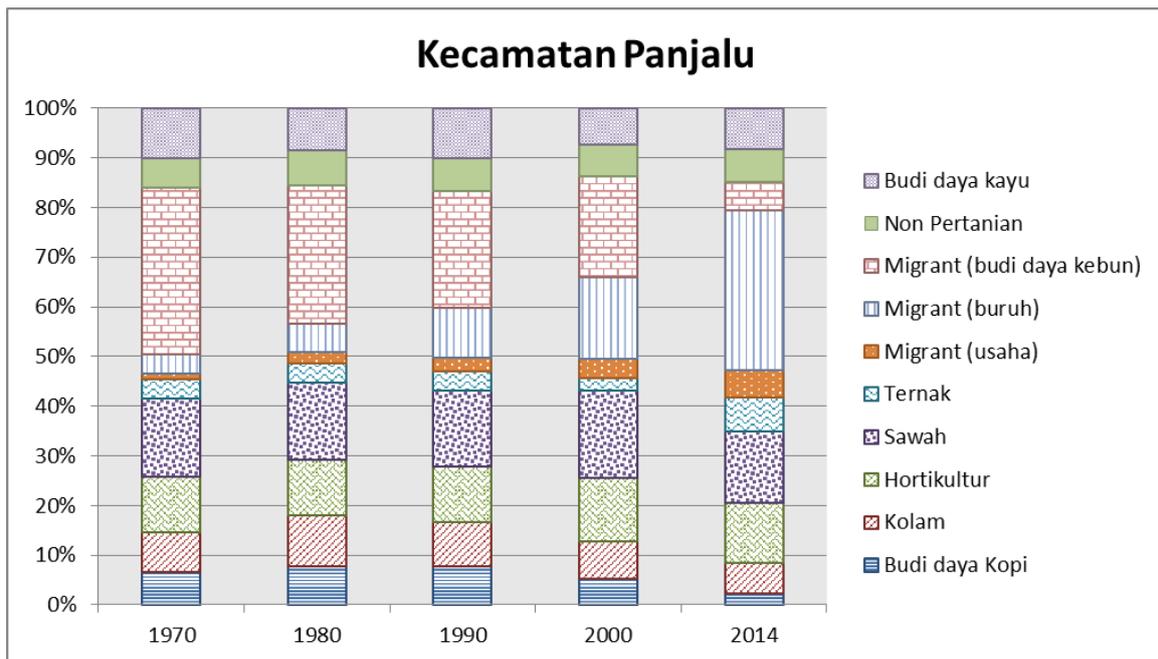
Minahan (2012) mendeskripsikan bahwa budaya Sunda sangat dipengaruhi oleh budaya Jawa, yang juga menjadi suku dominan di Pulau Jawa. Budaya sunda memiliki sistem hirarki yang lebih egaliter jika dibandingkan dengan budaya jawa. Model hirarki budaya Sunda terutama terlihat jelas dalam “undak usuk” bahasa Sunda, yaitu bahasa yang berbeda untuk tiap tingkatan umur dan kelompok yang dihormati. Budaya sunda memiliki pengaruh agama Islam yang sangat kuat. Minahan (2012) menyebutkan bahwa dengan kuatnya pengaruh agama Islam, sistem kepercayaan animisme tidak terlalu banyak dianut oleh masyarakat Sunda. Dengan latar belakang budaya pertanian, terutama pertanian padi, inti budaya sunda berkisar pada siklus pertanian tahunan.

Pada prinsipnya etnis sunda merupakan kelompok etnis yang menganut sistem bilateral (Indrawardana 2011) dimana garis keturunan bapak dan ibu sama. Meski demikian, Indrawardana (2011) juga memperkuat pernyataan ahli sejarah Ekadjati (2005) yang menyebutkan bahwa pola pewarisan masyarakat sunda memiliki prinsip “lalaki nanggung, aweve nyuhun” atau “lelaki memikul, wanita menyanggi”. Sebagaimana dalam hukum Islam dimana anak laki-laki mendapatkan dua kali porsi waris yang lebih besar karena harus menanggung berat (memikul) dan perempuan menanggung beban di kepala yang tidak seberat laki-laki (menyanggi).

3.3 Penghidupan masyarakat dan pola pemanfaatan lahan

Keempat desa penelitian memiliki pola penghidupan yang nyaris sama satu sama lain dengan beberapa variasi pola dalam sumber daya lahan yang mereka kelola. Penghidupan masyarakat terutama bersandar pada aktivitas migrasi-keluar desa, mengelola lahan pertanian sawah atau perkebunan. Saat ini (2014), ada sekitar 29% masyarakat di Kecamatan Panjalu yang bekerja di luar desa sebagai buruh atau tenaga kerja dan sekira 5% sebagai pengusaha. Mereka umumnya beraktivitas di kegiatan yang tidak berhubungan dengan pertanian dan perkebunan, yaitu di usaha rongsokan besi. Kegiatan non pertanian di dalam wilayah desa terutama dilakukan oleh sekitar 11% masyarakat, diantaranya untuk usaha bengkel, angkutan umum, berdagang dan karyawan atau pekerjaan sipil lainnya.

Fauziyah dkk (2014) menggambarkan penggunaan lahan yang utama di Kecamatan Panjalu adalah lahan hortikultur yang dari tahun ke tahun semakin berkurang proporsinya meski persentase orang yang bersandar pada tanaman hortikultur sebagai sumber penghidupan tetap. Sementara itu, lahan kayu proporsinya cukup meningkat dengan persentase orang yang mengelola kebun kopi tetap dari tahun ke tahun (berkisar pada 7 – 9%). Terdapat kecenderungan peningkatan yang cukup tajam pada 10 tahun ke belakang untuk lahan kopi. Namun demikian, masyarakat yang hidupnya bergantung pada pengelolaan kebun kopi di kecamatan ini justru cenderung menurun (pada sekitar tahun 1990 sekitar 7% dan sekarang hanya sekitar 2%). Pengelolaan kebun kopi ini terutama terdapat di Hujungtiwu. Di Kertamandala, pengelolaan kebun kopi dilakukan di lahan kawasan hutan dengan menerapkan skema PHBM yang dikelola Perhutani. Pengelola kebun kopi ini sebagian besar adalah pendatang dari desa sekitar, dan hanya sekitar 5% pengelola yang berasal dari Desa Kertamandala. De Royer dkk (2014) menjelaskan bahwa skema PHBM dari Perhutani tidak diminati oleh masyarakat Kertamandala karena mereka mengaku tidak punya keahlian untuk bertanam kopi.



Gambar 2. Sumber penghidupan masyarakat untuk setiap periode waktu (per 10 tahun)

Di Rajadesa, saat ini (2014), migrasi-keluar non pertanian dilakukan oleh 9% penduduk dimana mereka menjadi tenaga kerja (4%) dan membuka usaha non pertanian (5%). Hal yang cukup membedakan dengan Kecamatan Panjalu adalah banyaknya migrasi-keluar yang dilakukan untuk membuka kebun di wilayah lain, seperti di Desa Kertamandala (Panjalu), Kuningan, Cilumping (Jawa

Tengah) dan Lampung, sekira 24.5%. Selain itu sejumlah kecil TKI ke luar negeri yaitu sekitar 2%. TKI ini baru mulai dilakukan oleh di akhir dasawarsa ini. Jika di Panjalu, masyarakat yang mengelola lahan hortikultur dan padi sawah tidak banyak berubah setiap periode, di Rajadesa justru semakin menurun. Meski demikian secara luasan, sawah sebagai penggunaan lahan tidak menurun. Sawah, merupakan lahan yang menjadi sumber penghidupan subsisten mereka untuk memenuhi kebutuhan pangan selama lebih kurang 1 tahun.

Fauziyah dkk (2015) menggambarkan hal yang cukup menarik di Rajadesa, dimana lahan terlantar dari tahun ke tahun semakin berkurang secara signifikan, ditambah dengan meningkat signifikannya lahan kebun campur, serta peningkatan jumlah kebun kopi. Hal ini selaras dengan data sumber penghidupan sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 2, bahwa persentase masyarakat yang berkebudun kopi dan berkebudun campur mengalami peningkatan. Kebanyakan masyarakat di Kecamatan ini mengelola kayu dan kapulaga (kebun campur berbasis kayu), kayu dan kopi (kebun campur berbasis kopi), kopi dan kapulaga (kebun campur berbasis kopi), serta kayu, kopi dan kapulaga (kebun campur). Kebun kopi monokulturpun semakin meningkat jumlahnya pada era sekarang ini.

3.4 Pola migrasi-keluar (merantau)

Gambaran pola migrasi-keluar atau merantau di kecamatan Panjalu dan kecamatan Rajadesa telah dikemukakan secara lengkap dalam Mulyoutami (2014a) dan Fauziyah (2015). Secara ringkas pola tersebut meliputi 3 model:

3.4.1 Perantau berbasis non lahan tanpa modal

Merupakan kelompok perantau dari ekonomi menengah ke bawah, dengan kepemilikan lahan yang sangat rendah. Mereka pada umumnya memiliki motivasi untuk mencari uang tunai untuk pemenuhan kebutuhan harian serta upaya mengakumulasi modal untuk berusaha dan membuka kebun. Tujuan merantau umumnya ke wilayah perkotaan (Bandung, Jakarta dan Tasikmalaya) dan menjadi karyawan toko dan karyawan usaha rongsokan besi. Model merantau ini terdapat baik di Kecamatan Panjalu maupun Kecamatan Rajadesa. Model merantau yang dilakukan oleh kelompok ini umumnya hanya sebagian anggota keluarga, apakah itu laki-laki saja atau perempuan saja. Perantau umumnya laki-laki. Perempuan yang merantau terutama yang belum menikah. Pada saat mereka telah menikah, maka mereka memilih untuk berhenti bekerja di kota dan mengurus anak dan rumah tangganya. Anggota rumah tangga lainnya yang tidak merantau dan memilih menetap di desa biasanya tetap menjalankan usaha yang mereka punya di desa dan atau mengolah kebun yang mereka miliki.

3.4.2 Perantau berbasis non lahan dengan modal

Merupakan kelompok perantau dari ekonomi menengah ke atas dengan kepemilikan lahan medium. Mereka umumnya sudah memiliki sejumlah modal yang diperolehnya dari pekerjaan mereka terdahulu atau hasil dari kebun yang mereka olah ataupun berasal dari warisan/pemberian orang tua. Perantau model ini, sebagian besar membawa seluruh anggota keluarga dan hanya akan pulang ke desa tempat mereka berasal satu tahun satu kali, yaitu pada hari raya. Perantau utama umumnya adalah laki-laki. Jikapun ada perempuan yang ikut merantau, mereka umumnya tidak merantau secara

mandiri namun ikut anggota keluarga lainnya yang merantau. Pandjaitan (1990) menggambarkan kondisi di era 1990an untuk wilayah Kecamatan Rajadesa dimana perempuan yang merantau secara mandiri masih sedikit, kebanyakan dari mereka merantau bersama keluarga. Model merantau seperti ini lebih banyak dilakukan masyarakat di Kecamatan Panjalu, sangat sedikit yang terdapat di Kecamatan Rajadesa. Daerah yang dituju umumnya merupakan daerah perkotaan seperti di Bandung, Jakarta, dan Tasikmalaya. Usaha yang mereka lakukan pun hampir sama, yaitu usaha rongsokan besi. Nampak bahwa kesuksesan perantau sebelumnya dalam melakukan usaha rongsokan besi, serta jaringan yang mereka buat membuat perantau lainnya juga melakukan usaha yang sama.

3.4.3 Perantau berbasis lahan

Tipe perantau ini hanya ditemukan di Kecamatan Rajadesa. Lokasi utama yang mereka tuju adalah Sumber Jaya, Lampung, dengan sumber mata pencarian yang mereka lakukan adalah berkebun kopi. Merantau ke Lampung telah dilakukan sejak 30 tahun lalu. Migrasi-keluar ke berbagai daerah di Lampung ini masih berlangsung hingga kini, dan bersifat komutasi. Waktu merantau ke Lampung biasanya sekitar bulan April – May, dan mereka akan kembali sekitar bulan September. Waktu merantau ini disesuaikan dengan jadwal panen tanaman kopi di Lampung.

Sejalan dengan perkembangan tanaman kopi, meluasnya upaya pembukaan lahan kebun kopi baru tidak hanya ke Lampung saja, namun juga ke wilayah desa dan kecamatan lain di sekitar Kecamatan Rajadesa serta wilayah lainnya yang memungkinkan. Sebagian dari mereka membuka dengan cara mengakses lahan PHBM yang dikelola Perhutani, biasanya di Desa Kertamandala, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Kuningan, dan di Cilumping – Banyumas – Jawa Tengah), atau membeli lahan di daerah lainnya. Model merantau yang kemudian mereka lakukan berupa komutasi satu bulan satu kali atau tergantung kebutuhan, dan biasanya hanya dilakukan oleh laki-laki saja. Musim ramai merantau ke daerah ini dilakukan pada musim panen kopi (Mei – Agustus). Pada saat itu kebutuhan tenaga kerja sedang tinggi dan hampir semua anggota rumah tangga ikut merantau untuk membantu.

Satu hal penting yang membedakan pola merantau di Panjalu dan di Rajadesa adalah adanya sejarah merantau yang telah terlebih dahulu ada. Rajadesa sudah terkenal sebagai daerah dimana masyarakatnya banyak merantau ke Sumatra untuk bercocok tanam kopi, baik menjadi buruh tanam maupun mengusahakan lahannya sendiri. Sedangkan Panjalu, mereka lebih banyak menekuni usaha non-pertanian.

Menarik untuk menelusuri lebih lanjut awal keberlangsungan merantau di Rajadesa. Salah seorang narasumber menyatakan bahwa awal merantau ini adalah saat terjadi pemberontakan DI/TII yang membuat sebagian masyarakat berpencar untuk mencari lokasi yang lebih aman untuk bertani. Pendapat lainnya menyebutkan bahwa, awal merantau ini adalah kesuksesan program transmigrasi di Lampung dengan masyarakat Jawa Barat sebagai salah satu kelompok transmigran. Hal ini berkaitan dengan temuan Kusworo (2014) bahwa di Sumber Jaya, gelombang kedatangan para migran dari wilayah Ciamis, Tasikmalaya dan sekitarnya berawal dari program BRN sekitar tahun 1950an, yaitu program pemerintah merelokasi veteran perang untuk mengolah lahan di daerah tersebut. Sejatinnya, *out-migrant* Jawa Barat ini tidak semuanya merupakan veteran perang sebagaimana dikemukakan

oleh Heeren (1979), sebagian dari mereka adalah buruh pertanian dan sebagian lainnya para petani pengolah lahan. Program ini telah berhasil menarik migrasi-keluar spontan dari wilayah Jawa Barat, secara bergelombang. Era perpindahan yang terbesar ke Lampung terjadi sekitar tahun 1980 – 1990 an.

Perantau yang memilih berangkat ke kota, setelah mampu mengumpulkan uang (yang berarti mereka sudah berada di kelompok umur lebih dari 30 tahun), mereka dapat memulai usaha kebunnya. Pilihan berkebun dapat dilakukan di dalam desa, bilamana mereka masih memiliki tanah, maupun berkebun ke luar desa dengan mengikuti mekanisme PHBM di lahan kawasan negara yang dikelola oleh Perhutani. Sebagian lainnya, membeli lahan di luar desa dengan pertimbangan lahan yang mereka beli dapat untuk berkebun kopi. Pada kelompok perantau ini, perempuan dan laki-laki memiliki pola pengaturan merantau yang khas. Merantau rutin dilakukan oleh laki-laki untuk melakukan perawatan lahan dan tanaman, sedangkan merantau di satu waktu khusus dilakukan oleh seluruh anggota keluarga sebagai tenaga kerja membantu panen yang memerlukan tenaga kerja cukup besar.

3.5 Struktur kepemilikan lahan

Studi ini mencoba menelusuri kepemilikan lahan untuk setiap tipe lahan serta juga bukti legalitas dari status kepemilikan tersebut. Dari 125 rumah tangga yang diwawancarai, 1409 plot lahan yang dimiliki oleh total rumah tangga di dokumentasikan. Rata-rata kepemilikan lahan per-rumah tangga untuk Kecamatan Panjalu adalah 5.6 plot dan untuk Kecamatan Rajadesa adalah 5.8 plot. Dokumentasi mengenai siapa yang memiliki lahan untuk setiap lahan di rumah tangga disusun dalam Tabel 1. Lahan yang dimiliki oleh perempuan sekitar 17% dari yang dimiliki laki-laki dengan rata-rata luasan lahan yang hampir sama. Kepemilikan lahan masih lebih didominasi oleh laki-laki. Sekitar 28% lahan milik laki-laki diperoleh dengan membeli dan 26% lainnya diperoleh dari warisan. Sementara perempuan dapat memiliki lahan dengan cara membeli (2%) atau dari warisan (hampir sekitar 9%). Lahan yang dimiliki secara bersama (responden memilih untuk tidak memilah apakah lahan tersebut milik perempuan atau laki-laki) dengan cara membeli sekitar 14.5% dan dari warisan sekitar 7.5%.

Tabel 2. Struktur kepemilikan lahan untuk setiap tipe penggunaan lahan dalam rumah tangga petani

Jenis lahan	Bersama		Laki-laki		Perempuan		Total	
	% plot	Rata2 luas	% plot	Rata2 luas	% plot	Rata2 luas	% plot	Rata2 luas
Kebun campur	10.86%	0.29	29.12%	0.45	4.24%	0.21	44.21%	0.39
Kolam ikan	4.82%	0.02	10.42%	0.03	1.94%	0.01	17.18%	0.03
Pekarangan dan rumah	4.10%	0.03	10.28%	0.04	2.44%	0.03	16.82%	0.03
Sawah	5.97%	0.12	12.94%	0.14	2.88%	0.08	21.78%	0.13
Total	25.74%	0.16	62.76%	0.25	11.50%	0.11	100.00%	0.21

Sebagaimana di sebagian besar daerah pedesaan lain di Indonesia, masih sedikit masyarakat yang sudah memiliki surat kepemilikan tanah dari BPN atau Badan Pertanahan Negara. Hanya sekitar 3.7% dari 125 responden di kedua Kecamatan yang memiliki sertifikat BPN, dan sekitar 75% yang memiliki Letter C atau Surat Keterangan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari Dispenda Jawa Barat. Tabel 3 menunjukkan detail informasi mengenai surat pendukung kepemilikan lahan untuk di kedua kecamatan dengan disagregasi data antara perempuan dan laki-laki. Data di Tabel 2 dan Tabel 3 menunjukkan bahwa kepemilikan perempuan atas lahan sudah cukup diakui, meskipun legalitas kepemilikan atas nama perempuan baru sekitar 16%. Meski aturan BPN memungkinkan pencantuman nama perempuan sebagai pemilik lahan, namun kesepakatan dalam keluarga masih lebih berpihak kepada laki-laki. Laki-laki sebagai penopang ekonomi rumah tangga merupakan alasan utama bagi masyarakat mengapa pencantuman nama laki-laki lebih banyak dipilih.

Tabel 3. Bukti legalitas untuk lahan yang dimiliki rumah tangga petani

Legalitas kepemilikan	Bersama	Laki-laki	Perempuan	Total
Akta jual beli	2	5	-	7
PBB	267	664	127	1058
Sertifikat BPN	19*, masih atas nama laki-laki	29	4	52
Surat waris	-	-	2	2
Tidak ada	73	189	28	290
Total	361	887	161	1409

Catatan: * masih menggunakan atas nama laki-laki sebagai pemilik lahan, atau sudah mencantumkan nama suami dan istri

4. Perbedaan peran gender

Diskusi mengenai perbedaan peran gender terutama difokuskan pada kegiatan pertanian atau perkebunan baik yang berbasis kayu (*timber based farming practices*) dan non kayu (*non timber based farming practices*). Perbedaan peran gender terlihat jelas kegiatan pertanian/perkebunan berbasis kayu. Pada kebun berbasis kayu, 80% pekerjaan dilakukan oleh laki-laki. Perempuan berperan mengolah kebun kayu terutama untuk membantu pekerjaan laki-laki dalam merawat kebun seperti aplikasi pupuk (*mupuk*) dan menyiangi tanaman liar (*weeding* – Inggris atau *ngored* - Sunda). Peran perempuan kecil di kebun kayu karena bilamana pohon kayu sudah tumbuh cukup besar tidak banyak lagi yang perlu dilakukan di kebun kayu. Kebun kayu umumnya dikelola tidak secara intensif, perawatan yang dilakukan hanya memupuk dan menyiangi saja. Kegiatan panen kayu, biasanya sudah diserahkan kepada pemborong atau pembeli kayu, sehingga perempuan tidak perlu lagi banyak berkontribusi tenaga. Dalam panen, biasanya baik perempuan maupun laki-laki bersama-sama mengumpulkan ranting-ranting kering untuk kayu bakar. Lagipula panen pohon biasanya merupakan pekerjaan yang sangat berat, dan 90% dilakukan oleh tenaga kerja laki-laki.

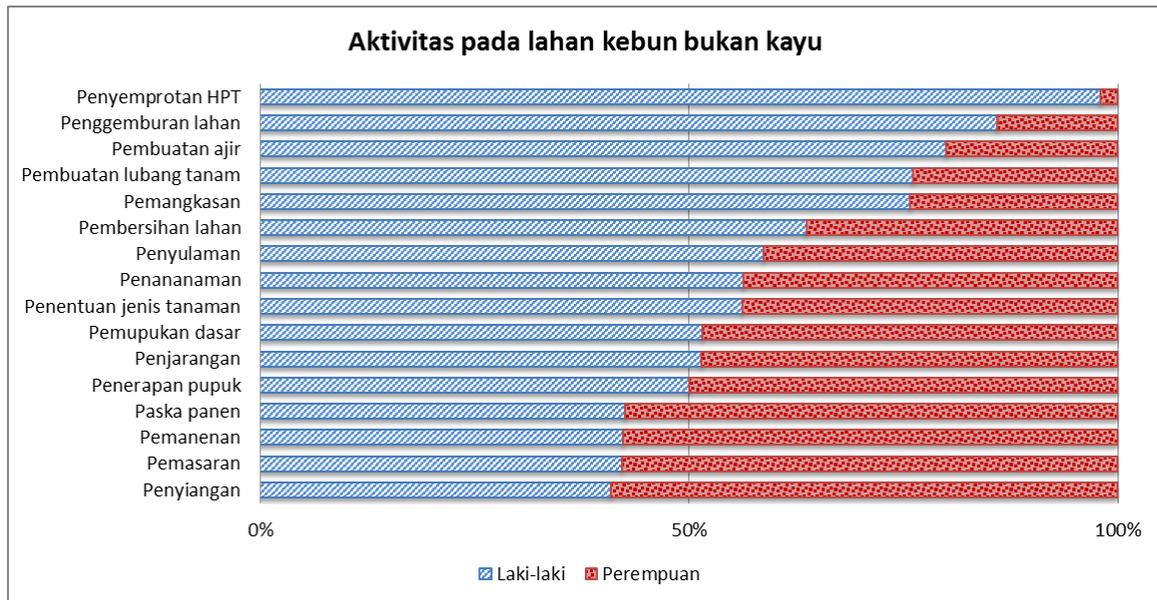
Pada kebun yang berbasis non kayu, diantaranya kebun kopi dan lahan kapulaga, peran perempuan cukup besar. Di kebun kopi, perempuan memiliki peran cukup besar dalam panen dan proses paska

panen, serta juga dalam pemasaran. Di Kecamatan Rajadesa, besarnya peran perempuan dalam kegiatan panen kopi nampak pada tingginya tingkat migrasi-keluar (merantau) ke Lampung maupun ke berbagai daerah di sekitar kecamatan dimana kebun kopi berada (Areal Perhutani di Desa Kertamandala, Kecamatan Panjalu, dan Kuningan). Pada bulan Juni – Agustus dimana musim panen berada, baik laki-laki dan perempuan melakukan panen di kebun miliknya sendiri atau dengan maksud membantu panen di kebun orang lain sebagai tenaga kerja. Umumnya kegiatan panen dilakukan oleh suami dan istri beserta anggota keluarga yang tidak dibayar lainnya. Namun demikian, tidak sedikit pula orang yang mengupahkan kegiatan panen kepada tetangga atau kerabat yang tinggal berdekatan dengan lokasi kebun mereka. Demikian juga untuk kegiatan paska panen, mengupas dan menjemur, peran perempuan cukup tinggi. Namun demikian, tetap dalam pengelolaan kebun, laki-laki lebih banyak yang melakukan dan memiliki tanggung jawab besar.

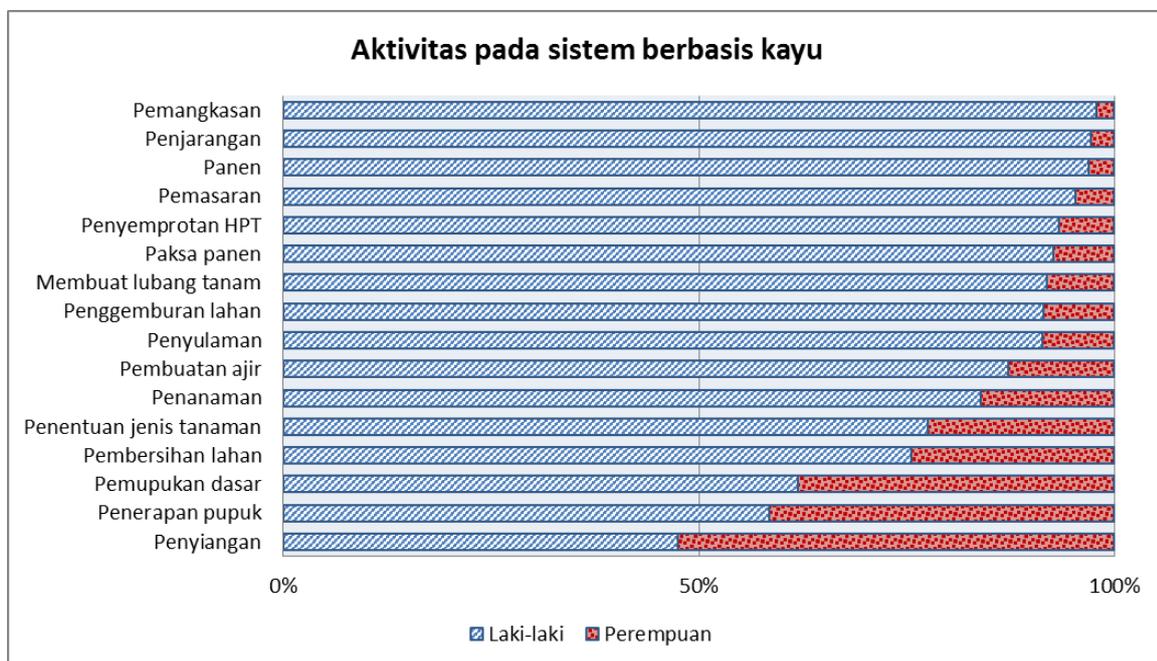
Peran perempuan di kebun dengan tanaman kapulaga juga tampak cukup besar. Tanaman ini dapat dipanen tiga kali satu tahun, dan yang kebanyakan melakukan perawatan dan pemanenan adalah ibu-ibu. Termasuk juga dalam pemasaran, ibu-ibu memiliki peran cukup besar.

Pada semua aktivitas kebun baik berbasis kayu maupun non kayu, aplikasi pupuk dilakukan dengan kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Namun demikian, sangat sedikit sekali perempuan (lebih kurang 5%) yang berperan dalam aplikasi pestisida. Aplikasi pestisida membutuhkan keterampilan tersendiri serta juga kadang penyakit atau tanaman yang mengganggu berada di lokasi yang tidak terjangkau oleh perempuan. Selain itu, perempuan menyatakan bahwa mereka tidak terlalu paham tentang penyakit tanaman. Perempuan lebih berkenan untuk membantu menyiangi lahan, baik sebagai tenaga keluarga maupun sebagai buruh upahan.

Di semua kebun, perempuan dan laki-laki dapat berperan sebagai tenaga keluarga maupun sebagai buruh upahan. Jam kerja yang secara umum diterapkan di kedua Kecamatan ini adalah separuh hari yaitu dari jam 7 pagi hingga jam 1 siang, dan satu hari penuh yang dilakukan hingga pukul 3 sore. Perempuan umumnya bekerja separuh hari, dengan upah Rp. 20.000 – 25.000 sudah termasuk makan per-harinya. Laki-laki umumnya bekerja satu hari penuh dengan upah Rp. 45.000 – 50.000 sudah termasuk makan dan rokok. Pekerjaan yang biasa diupahkan kepada perempuan baik di kebun kayu maupun kopi adalah pembersihan lahan, penanaman, aplikasi pupuk, panen, dan paska panen. Sedangkan pekerjaan yang dilakukan laki-laki adalah pembersihan lahan, membuat lubang tanam, aplikasi pupuk, pestisida dan herbisida serta juga panen, paska panen. Tingginya upah laki-laki terutama dikarenakan panjang waktu kerja yang sampai sore, sementara perempuan tidak mengerjakan sampai sore, meski jenis pekerjaannya hampir sama. Yang sangat jarang dilakukan oleh perempuan, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, adalah aplikasi pestisida.



Gambar 3. Peran perempuan dan laki-laki di lahan berbasis tanaman kayu



Gambar 4. Peran perempuan dan laki-laki di lahan berbasis tanaman non kayu

5. Gender dan ruang

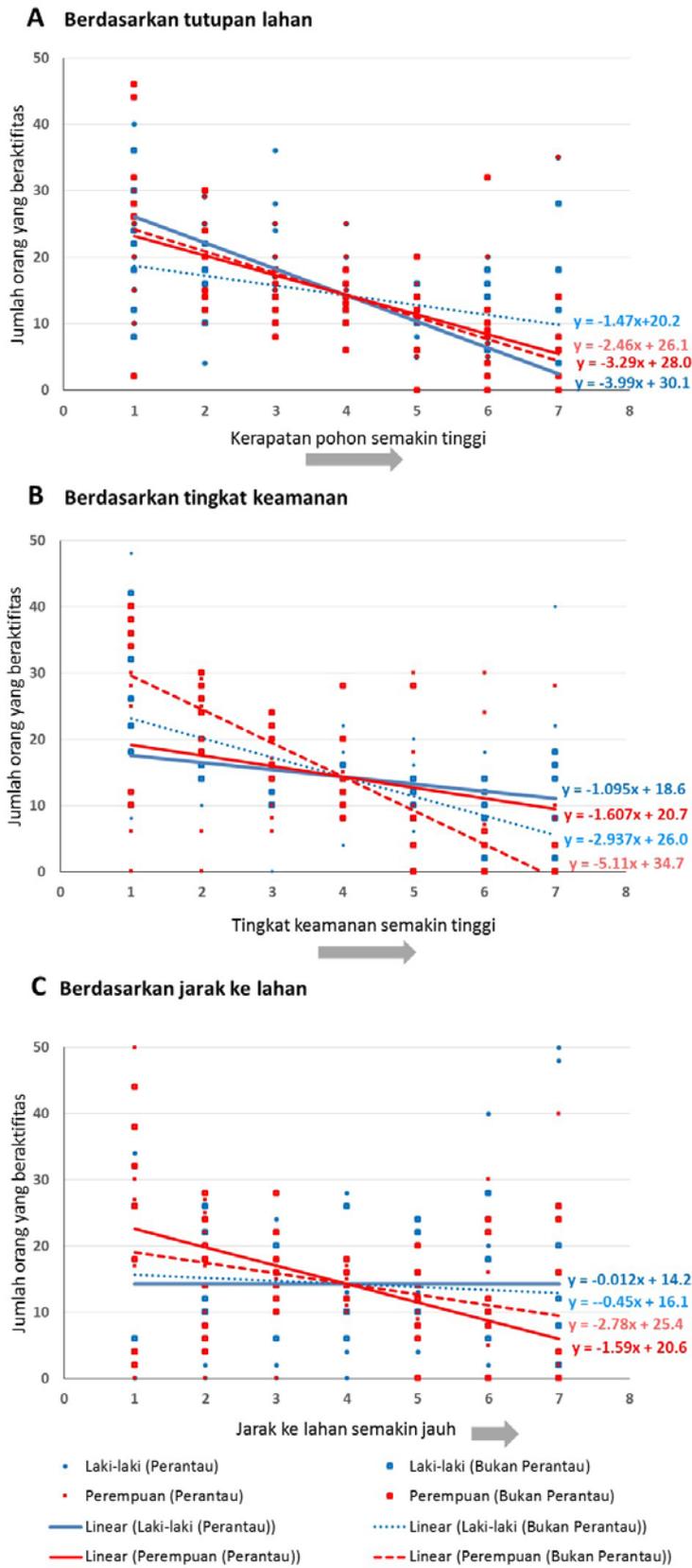
Dalam kaitannya dengan aktivitas mencari sumber penghidupan masyarakat peri-urban, pola ruang menentukan ruang gerak spasial setiap gender. Krishna (2004) memperkenalkan konsep 'genderscape' yang melihat ruang gender yang ditentukan oleh praktek budaya yang dilakukan saat ini dalam mengelola lahan, sumber daya air, tanaman pangan dan hutan. Krishna (2004) menekankan

bahwa praktek tersebut berkaitan erat dengan struktur sosial yang terbangun dan berkembang antar ruang dan waktu melalui berbagai proses sosial. Rochealau dan Edmunds (1997) melihat hubungan perempuan dan laki-laki dengan lahan dan kepemilikannya menggunakan proporsi ruang (*spaces*) dan tempat (*places*).

Diskusi kelompok terfokus dilakukan untuk melihat bagaimana pola ruang antar gender dan antara kelompok masyarakat (*perantau/out-migrant* dan *bukan-perantau/stayer*). Gambar 5 menunjukkan diagram terpencah (*scatter*) dari masing-masing kelompok yang dihasilkan dari proses diskusi. Secara umum ada tiga hal besar yang dapat disimpulkan dari gambar-gambar tersebut:

5.1.1 Banyaknya orang bekerja di tiap tipe tutupan lahan

Hubungan antara tipe tutupan lahan dengan banyaknya orang yang bekerja di setiap tipe lahan cukup kuat, terutama pada komunitas yang menetap di desa. Semakin rapat tutupan lahannya, semakin sedikit orang yang beraktivitas, terutama perempuan. Hubungan antara tipe tutupan lahan dan banyaknya aktivitas perempuan lebih erat dibandingkan dengan hubungan tutupan lahan dengan aktivitas laki-laki. Selain karena alasan keamanan yang dikemukakan baik oleh kelompok diskusi perempuan dan laki-laki, tutupan lahan yang rapat dan terdapat di desa pun sudah tidak lagi banyak, sehingga tidak banyak lagi aktivitas dilakukan di area ini. Saat ini, proporsi hutan di Kecamatan Panjalu hanya tersisa sekitar 2.3% dan di Rajadesa kurang dari 1%. Kebanyakan masyarakat beraktivitas di areal kebun campuran berbasis kayu untuk Kecamatan Panjalu, dan di Kecamatan Rajadesa kebanyakan di kebun campuran – coklat dan kayu. Namun demikian, kedua kelompok diskusi sepakat bahwa, bilamana luasan areal dengan tutupan lahan padat masih ada, sangat sedikit aktivitas yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat yang merantau tidak terlalu banyak yang beraktivitas di areal lahan dengan tutupan lahan padat jika dibandingkan mereka yang menetap di desa. Hal ini karena aktivitas merantau dan non pertanian masih menjadi alternatif penghidupan yang mereka prioritaskan.



Gambar 5. Pola ruang antar gender dan antar kelompok masyarakat dilihat dari 3 kondisi: (A) kerapatan pohon, (B) tingkat keamanan dan (C) jarak ke lahan dari tempat tinggal.

5.1.2 Jarak lahan dari tempat tinggal dan jumlah orang yang beraktivitas

Perbedaan cukup terlihat antara kelompok diskusi perempuan dan laki-laki. Perempuan (baik yang merantau dan yang menetap di desa) melihat hubungan yang sangat kuat antara jarak lahan atau tempat bekerja dengan rumah tinggal. Kelompok diskusi laki-laki melihat hubungan yang tidak erat diantara keduanya. Bagi laki-laki pilihan ruang untuk bekerja sangat tergantung dari ketersediaan lahan dan areal bekerja mereka. Bagi masyarakat pekebun, dimanapun lokasi kebun yang mereka miliki, meskipun itu jauh, tetap harus mereka olah dan mereka tetap memiliki banyak kegiatan disana. Perempuan senantiasa mempertimbangkan lokasi dimana area kerja mereka berada yang memungkinkan mereka untuk tetap melakukan tanggung jawabnya mengurus anak dan kegiatan rumah tangga. Dengan demikian, semakin jauh lokasi lahan dari tempat tinggal mereka, maka semakin sedikit aktivitas mereka. Demikian juga pada masyarakat yang merantau keluar, pertimbangan kedekatan dengan keluarga dan rumah masih menjadi pertimbangan. Pilihan merantau akhirnya dilakukan dengan membawa serta keluarganya. Kecuali bagi perantau yang belum berkeluarga.

5.1.3 Keamanan dan pilihan ruang bekerja

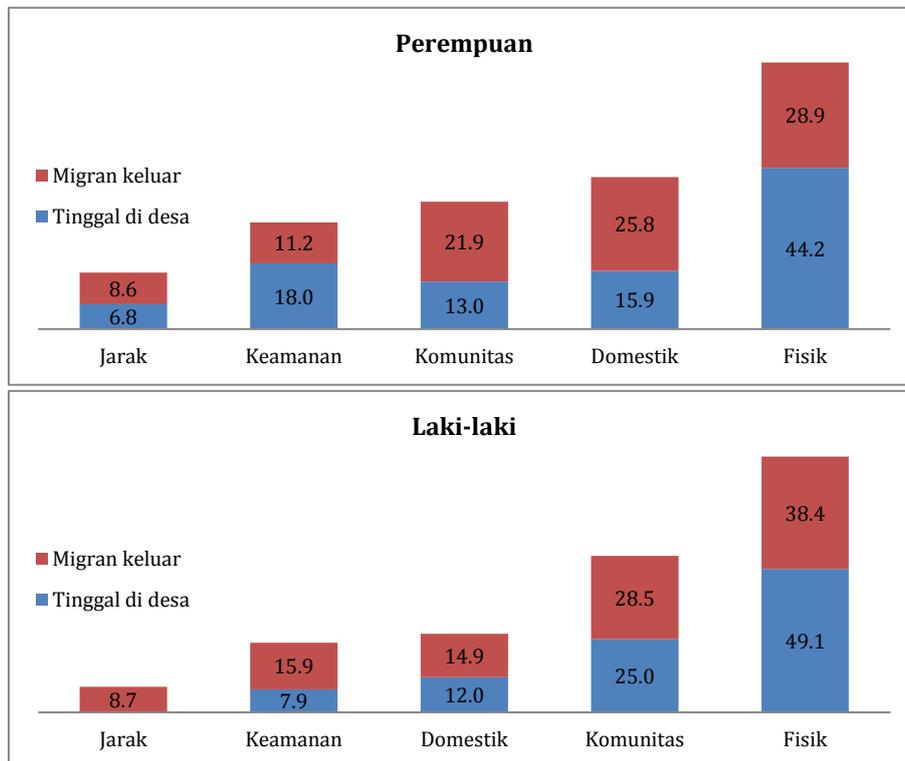
Faktor keamanan, yaitu aman dari gangguan orang jahat, makhluk halus dan berbagai resiko kerja lainnya menjadi faktor yang cukup berpengaruh menentukan banyak sedikitnya laki-laki dan perempuan untuk mengakses suatu lahan terutama pada masyarakat yang tidak merantau. Semakin tidak aman lokasi lahan atau tempat mereka bekerja, maka semakin sedikit diakses baik oleh perempuan dan laki-laki baik secara berkelompok maupun perorangan. Gambaran yang berbeda nampak pada komunitas perantau. Pada komunitas ini, hubungan antara faktor keamanan dan jumlah orang yang beraktivitas tidak erat. Faktor keamanan tidaklah menjadi krusial, baik bagi kelompok perempuan maupun laki-laki, terutama bila mereka bekerja dalam kelompok.

5.2 Faktor-faktor yang menentukan ruang yang dipilih

Faktor yang menentukan ruang gerak perempuan dan laki-laki adalah tanggung jawab di rumah, tanggung jawab di masyarakat, keamanan, jarak tempat bekerja dengan rumah, serta kondisi fisik (Gambar 6). Tanggung jawab di rumah (*domestic*) adalah tanggung jawab yang harus dilakukan di dalam rumah, diantaranya mengurus anak, memasak, dan membersihkan rumah. Tanggung jawab di masyarakat meliputi tanggung jawab bilamana ada kegiatan di masyarakat seperti kematian, pernikahan, dan gotong royong. Faktor keamanan meliputi rasa aman dari segala gangguan orang jahat, binatang, cuaca buruk, dan makhluk halus.

Gambar 6 menunjukkan faktor fisik menjadi pertimbangan utama baik bagi perempuan dan laki-laki. Dalam kaitannya dengan pengelolaan lahan, maka kemampuan fisik menjadi modal utama yang menentukan dimana lahan yang dapat mereka olah untuk dijadikan sumber penghidupan mereka. Faktor yang kedua meliputi faktor tanggung jawab, yaitu tanggung jawab di rumah dan di komunitas. Baik laki-laki dan perempuan menempatkan faktor tanggung jawab ini untuk menentukan dimana mereka akan banyak beraktivitas. Jika bagi perempuan tanggung jawab domestik lebih utama, maka

bagi laki-laki tanggung jawab di komunitas lebih utama. Perempuan memiliki tanggung jawab lebih dalam rumah tangga, sementara untuk di komunitas, terutama pada saat acara kematian, maka peran laki-laki dan perempuan cukup besar. Faktor keamanan menjadi faktor yang keempat, sebelum jarak dari lahan ke rumah.



Gambar 6. Faktor-faktor yang menentukan pemilihan ruang bagi setiap kelompok gender.

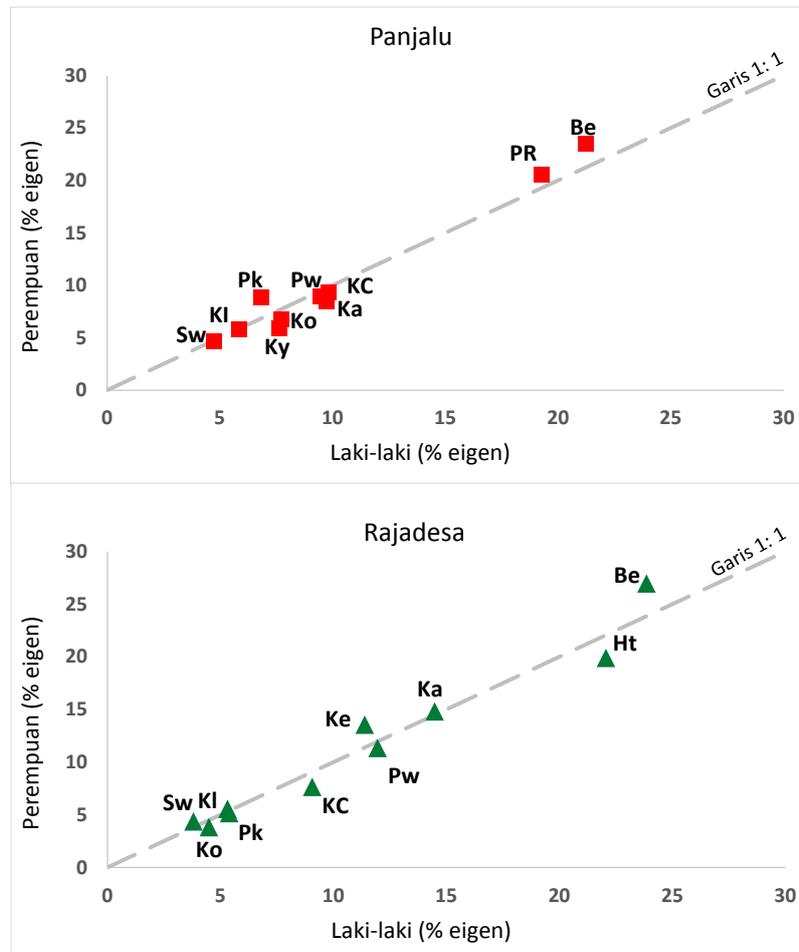
Angka dalam grafik menunjukkan persentase responden.

5.3 Preferensi gender terhadap lahan – AHP

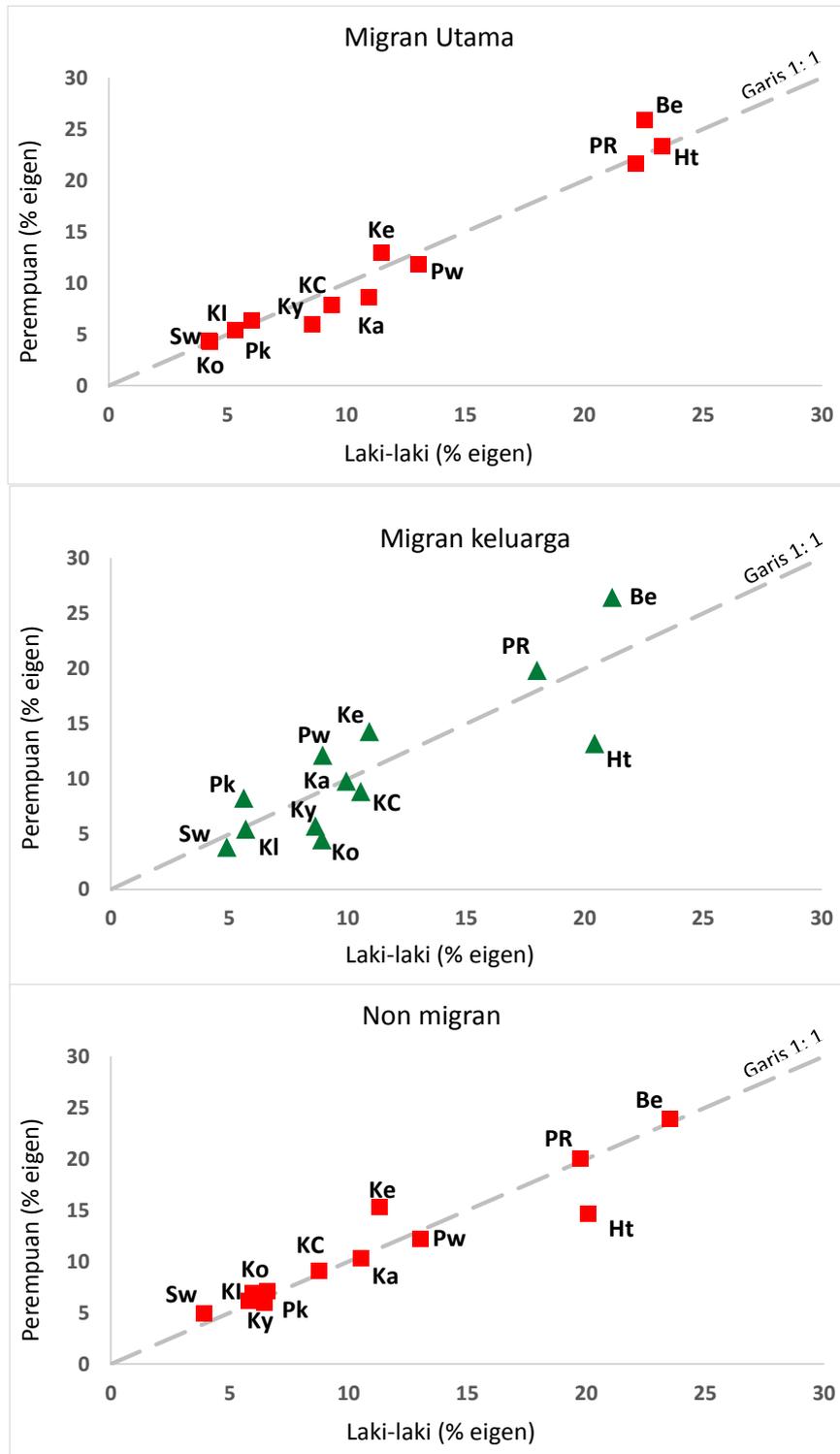
Memahami preferensi masing-masing kelompok gender terhadap jenis lahan yang mereka kelola di desa dilakukan dalam diskusi kelompok maupun dalam survey rumah tangga. Dengan mengadopsi metode AHP (Janudianto dkk 2014), diskusi dilakukan guna melihat bagaimana masing-masing gender dalam setiap tipologi masyarakat menentukan jenis lahan yang akan mereka ganti dengan penggunaan lahan yang lebih produktif secara ekonomi. Metode ini digunakan untuk mendapatkan nilai eigen (nilai yang menunjukkan karakteristik atau ciri yang paling kuat untuk masing-masing variabel) yang akan menentukan lahan yang paling ingin diganti oleh setiap kelompok diskusi. Selanjutnya nilai eigen ini ditransformasi dengan membagi masing-masing nilai eigen terhadap total nilai eigen, sehingga didapatkan nilai persentase eigen suatu penggunaan lahan. Nilai persentase tertinggi menunjukkan kecenderungan tingginya peluang untuk mengubah lahan tersebut.

Hasil AHP menunjukkan bahwa preferensi antara perempuan dan laki-laki tidak jauh berbeda. Semak belukar, lahan berumput (padang rumput) dan areal yang masih menyerupai hutan (semak belukar tua)

merupakan areal yang pertama kali akan dikonversi menjadi penggunaan lahan lain yang lebih produktif. Bagi masyarakat Panjalu (Gambar 7), karena areal berhutan sudah sangat sedikit, maka areal padang rumput dan semak belukarlah yang menjadi pilihan untuk dikonversi. Sedangkan di Rajadesa, perempuan akan mengubah areal semak belukar sebagai pilihan yang pertama, dan laki-laki lebih memilih areal semak yang sudah menyerupai hutan.



Gambar 7. Preferensi lahan antar kelompok gender di lokasi penelitian di Kabupaten Ciamis, garis 1: 1 menunjukkan persepsi perempuan yang persis sama dengan persepsi laki-laki, dan huruf pada gambar menunjukkan tipe penggunaan lahan: Sw=sawah, Kp=kopi, Kl=kelapa, Pk=pekarangan, Ky=kebun kayu, KC=kebun campur, Ka=kapulaga, Ke=kelapa, Rp=padang rumput, Bl=belukar dan Ht=areal berhutan



Gambar 8. Preferensi lahan yang akan dikonversi per-kelompok gender dalam tipologi perantau (*out-migrant*) dan bukan-perantau, garis 1: 1 menunjukkan persepsi perempuan yang persis sama dengan persepsi laki-laki, dan huruf pada gambar menunjukkan tipe penggunaan lahan: Sw=sawah, Kp=kopi, Kl=kelapa, Pk=pekarangan, Ky=kebun kayu, KC=kebun campur, Ka=kapulaga, Ke=kelapa, Rp=rpadang rumput, Bl=belukar dan Ht=areal berhutun

Gambar 8 menunjukkan konsistensi di setiap tipologi perantau (*out-migrant*) dan bukan-perantau (*stayer*) bahwa perempuan akan cenderung mengkonversi lahan yang non produktif, atau semak-belukar, sementara laki-laki cenderung memilih lahan yang masih cukup produktif, yaitu areal berhutan (tempat mencari kayu bakar) dan padang rumput (tempat menggembala). Pilihan laki-laki ini mempertimbangkan tingkat kesuburan lahan, dimana areal bekas hutan memiliki kesuburan yang lebih tinggi, dan dapat memberikan hasil yang lebih besar jika dibandingkan lahan bekas semak belukar. Pilihan pada rumput terutama dengan mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan untuk mengolahnya. Jika mereka mengubah semak belukar, biaya pembukaan lahan akan lebih tinggi sementara kesuburan tanahnya tidak terlalu tinggi. Jadi pilihan laki-laki lebih bersifat ekonomi. Sementara itu, perempuan memiliki argumen untuk mengubah semak belukar karena mempertimbangkan rendahnya manfaat langsung maupun tidak langsung dari lahan ini.

Perbedaan yang cukup mendasar dari kedua kecamatan adalah pandangan mereka mengenai lahan palawija. Di Rajadesa, lahan palawija, karena bukan merupakan pendapatan yang utama dan memberikan pendapatan yang cukup tinggi, maka areal ini cukup menjadi prioritas untuk diganti bilamana mereka akan menanam tanaman lain yang lebih produktif. Termasuk juga lahan kapulaga, karena hanya memberikan hasil yang sedikit. Pendapatan dari kegiatan non pertanian, serta juga maraknya pembukaan lahan untuk kebun kopi membuat lahan-lahan tersebut kemudian diubah menjadi kebun kopi. Di Panjalu, lahan palawija cukup dipertahankan, bahkan mereka memiliki kecenderungan untuk mempertahankan lahan palawija daripada kebun campur.

Sebagaimana hasil dari diskusi kelompok, hasil survey rumah tangga menunjukkan bahwa lahan kolam dan sawah yang paling dipertahankan di kedua kecamatan tersebut. Ditinjau dari tipologi perantau (*out-migran*) dan bukan-perantau/*stayer* (Gambar 8), terlihat jelas bahwa sawah dan kolam ikan senantiasa paling dipertahankan untuk tiap tipologi. Lahan sawah sangat penting bagi masyarakat sebagai sumber pangan keluarga dan merupakan simbol kesejahteraan. Jika di Panjalu terdapat 70% masyarakat yang memiliki sawah, dengan luasan rata-rata 0.5 - 2 ha, luasan sawah rata-rata di Rajadesa sekitar 0.5 – 1 ha dan dimiliki oleh 60% masyarakat. Kolam ikan hampir dimiliki oleh 90% masyarakat di kedua kecamatan tersebut. Kolam ini memiliki nilai yang cukup penting bagi budaya sunda, selain untuk memenuhi kebutuhan subsisten (makanan harian), sewaktu-waktu dapat dijual.

Pekarangan merupakan lahan yang cukup dipertahankan di tiap kecamatan. Di Panjalu (Gambar 7), lahan pekarangan disebutkan hanya di kelompok diskusi perempuan. Bagi tiap rumah tangga di Panjalu, nilai pekarangan dianggap tinggi oleh kelompok perempuan, sementara bagi kelompok laki-laki, nilainya lebih rendah. Sementara di Rajadesa, nilai yang diberikan kepada pekarangan sama antara laki-laki dan perempuan. Namun demikian, pekarangan tetap akan dipertahankan untuk tidak dikonversi menjadi tanaman lain, karena pekarangan memiliki fungsi penting sebagai warung hidup dan apotik hidup. Pekarangan memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan harian tanpa harus mengeluarkan uang.

Preferensi untuk mempertahankan kebun yang produktif, seperti kebun kayu dan kebun kopi serta kebun campur tampak lebih tinggi pada laki-laki. Mereka berpendapat bahwa bilamana lahan yang mereka miliki terbatas, maka lahan produktif itulah yang akan dicoba untuk ditingkatkan produksinya.

Perempuan memiliki kecenderungan untuk mempertahankan lahan yang dapat memenuhi kebutuhan harian dan subsisten seperti sawah, kolam ikan, lahan palawija, dan kebun kelapa. Cukup terlihat bahwa preferensi laki-laki lebih berfikir untuk produksi dan perempuan lebih berfikir untuk keberlanjutan (*sustainable*).

Gambar 8 mengindikasikan bahwa pada kelompok yang tidak merantau (bukan-perantau), nilai lahan antar satu dengan lainnya lebih dekat daripada kelompok yang merantau, baik mereka yang menjadi perantau utama maupun yang anggota keluarganya merantau (keluarga-perantau). Kelompok ini memiliki alternatif pendapatan dari non pertanian atau yang tidak secara langsung berhubungan dengan pertanian. Sementara pada kelompok yang tidak merantau (bukan-perantau), mereka umumnya tetap bertani dan berkebun, sehingga semua tipe lahan memiliki nilai penting yang hampir setara, dan tidak ada perbedaan yang jelas antara laki-laki dan perempuan.

6. Sumber daya dan kesejahteraan manusia

Kualitas hidup manusia dalam berbagai aspek kehidupan perlu diukur guna memetakan hasil pembangunan yang telah dilakukan selama ini. Berbagai ukuran digunakan dan distandarkan untuk setiap daerah guna membandingkan tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup manusia di berbagai latar budaya, sosial, dan lingkungan masyarakat. Namun demikian, karena ukuran yang digunakan merupakan ukuran standar di berbagai wilayah, seringkali itu tidak terlalu tepat menggambarkan level kualitas hidup manusia. Studi ini berupaya melihat ukuran yang standar digunakan dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, dan Indeks Pemberdayaan Gender. Namun demikian, ukuran yang bersifat subyektifs dan spesifik lokal digunakan untuk memberikan potret yang lebih utuh mengenai kondisi gender.

6.1 Disparitas gender dalam kualitas pembangunan

BPS dan Badan Pemberdayaan Perempuan mengeluarkan publikasi mengenai disparitas gender dalam pembangunan Indonesia dengan menggunakan data yang dikeluarkan BPS untuk indeks pembangunan manusia, indeks pemberdayaan gender, dan indeks pembangunan gender. Tulisan ini secara khusus mengkaji bagaimana disparitas gender yang terjadi di provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Ciamis sebagai titik perhatiannya.

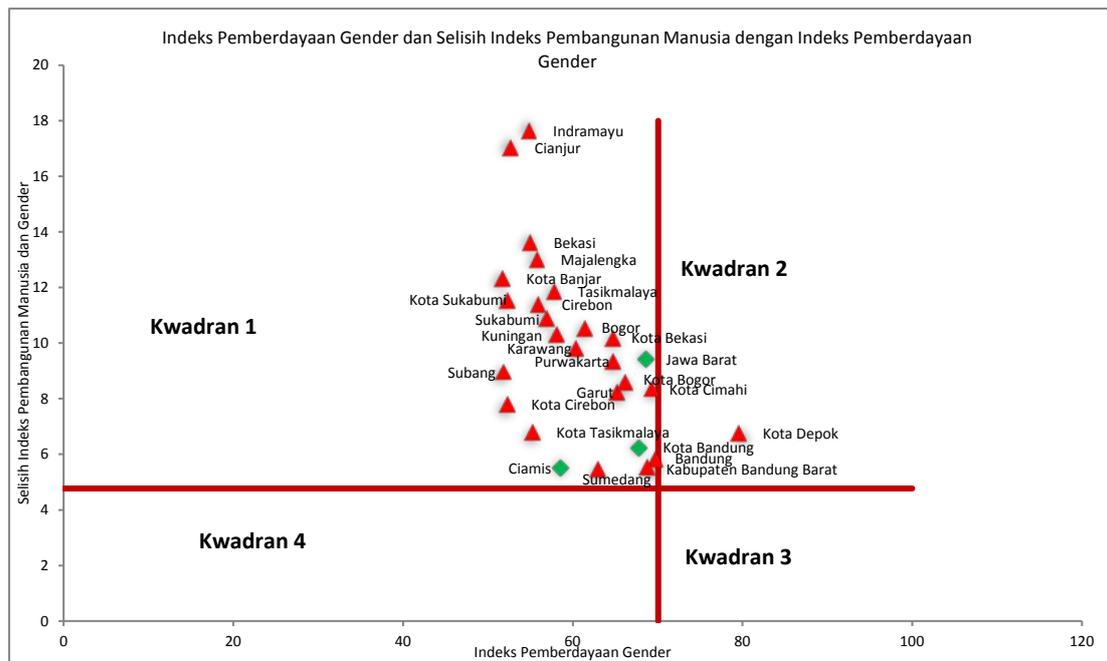
Indeks Pembangunan Manusia merupakan alat ukur keberhasilan pembangunan manusia yang ditinjau dari beberapa dimensi kehidupan manusia. Dimensi pertama adalah peluang hidup sehat dan panjang umur yang diukur dengan angka harapan hidup saat lahir. Indeks pendidikan merupakan dimensi yang kedua yang diukur dengan angka melek huruf (*literacy*) pada orang dewasa yang dikombinasikan dengan lamanya waktu dalam mengenyam pendidikan formal (rata-rata lama sekolah atau *school length*). Dimensi yang terakhir merupakan dimensi kesejahteraan secara ekonomi yang diukur melalui standar kehidupan layak. Standar ini diukur dari pengeluaran per-kapita yang telah disesuaikan. Indeks pembangunan gender menggunakan dimensi dan angka indeks yang sama dengan indeks pembangunan manusia, namun dengan menggunakan data yang disagregasi sex. Perbedaan yang

cukup penting dicatat adalah dalam mengukur sumberdaya ekonomi, IPM menggunakan standar hidup layak, IPG menggunakan kontribusi dalam pendapatan. Indeks ini menunjukkan apakah masing-masing indikator itu tersebar secara merata di masing-masing sex/gender. Indeks pembangunan manusia yang tinggi menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan sudah mampu meningkatkan kualitas hidup manusia, demikian juga dengan indeks pembangunan gender. Selisih antara indeks pembangunan manusia dan gender akan menunjukkan apakah pembangunan yang berlangsung mampu meningkatkan kualitas hidup kedua sex/gender. Selisih yang besar menunjukkan bahwa pembangunan tersebut masih memiliki disparitas yang tinggi dimana hanya salah satu sex/gender saja yang berhasil meningkat kualitas hidupnya.

Indeks pemberdayaan gender merupakan indeks untuk melihat partisipasi gender dalam kegiatan politik, pengambilan keputusan dan sumber daya ekonomi (penghasilan). Indikator yang digunakan adalah proporsi perempuan dan laki-laki dalam parlemen, proporsi perempuan dan laki-laki sebagai profesional, teknisi, dan pimpinan, serta estimasi penghasilan perempuan dan laki-laki. Tingginya nilai IDG menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pembangunan relatif setara.

Gambar 9 menunjukkan kondisi disparitas gender dalam pembangunan manusia berdasarkan data IPM, IPG dan IDG untuk tingkat kota di Jawa Barat (BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2012). Kwadran 1 merupakan kelompok kota yang memiliki selisih IPM dan IPG yang berada di atas standar nasional (4.77) dan nilai IPG yang dibawah nilai IPG nasional (70.07). Disparitas gender masih terlihat cukup tinggi dan peran serta perempuan dalam parlemen dan pengambilan keputusan masih lebih rendah daripada pembangunan di Indonesia secara keseluruhan. Kabupaten Ciamis, Kota Bandung sebagai ibukota provinsi, dan Provinsi Jawa Barat berada di kuadran ini. Kabupaten Ciamis, berada di titik terbawah yang menunjukkan bahwa disparitas gender dalam pembangunan masih lebih baik jika dibandingkan ibukota dan provinsi sendiri. Meski demikian representasi perempuan dalam parlemen masih lebih rendah. Kota Depok terlihat paling baik diantara kota dan kabupaten yang lain. Representasi gender sudah lebih setara dengan nilai yang hampir mencapai 80.

Jika indeks tersebut dibedah untuk masing-masing indikatornya, rendahnya nilai IPG terutama disebabkan oleh rendahnya kontribusi perempuan terhadap pendapatan. Kontribusi perempuan hampir separuh (33.8%) dari kontribusi laki-laki (66.1%). Di Kabupaten Ciamis, dan juga sebagian besar kota/provinsi lainnya Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. AHH di Ciamis untuk perempuan 69.50 tahun dan untuk laki-laki 65.55 tahun. Untuk angka melek huruf dan lamanya masa sekolah, laki-laki cenderung lebih tinggi namun dengan perbedaan yang tidak terlalu mencolok. Angka melek huruf laki-laki 99.15% dan perempuan 97.12%, sedangkan lama sekolah laki-laki 7.88 tahun dan perempuan 7.44 tahun.



Gambar 9. Penilaian disparitas gender melalui IPM, IPG, dan IDG di Provinsi Jawa Barat.

Sumber data dari BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2012.

6.2 Ukuran kualitas hidup dan kondisi saat ini

Telah disebutkan di muka bahwa ukuran kualitas masyarakat yang bersifat subyektif perlu dilakukan untuk melihat seberapa besar mereka menilai kualitas hidup, dan bagaimana perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Studi ini juga ingin melihat ukuran-ukuran spesifik daerah yang digunakan untuk menentukan tingkat kualitas hidup masyarakat dalam bentuk kepuasan dan kebahagiaan. Kualitas hidup subyektif ini merupakan salah satu wujud budaya yang merupakan proses pengalaman sekelompok masyarakat dalam hubungannya dengan lingkungan (alam, fisik, dan sosial) (Sumarti 1999:32).

Sejatinya, studi ini mencoba membidik mengenai kualitas hidup manusia, dimana kesejahteraan menjadi salah satu penentu kualitas seseorang. Namun, dalam proses diskusi bersama masyarakat desa yang dikaji, kualitas hidup sering diartikan sebagai tingkat kesejahteraan. Selanjutnya istilah kualitas seringkali disetarakan maknanya dengan kesejahteraan namun dengan penekanan bahwa kesejahteraan/*well-being* tetap merupakan bagian dari kualitas hidup (*quality of life*) seseorang.

Hasil diskusi kelompok terpilah gender dan terpilah status perantau (perantau, keluarga-perantau, bukan-perantau) menunjukkan beberapa perbedaan ukuran penentu kualitas hidup manusia yang bersifat subyektif. Masing-masing ukuran yang dikemukakan oleh peserta diskusi dihitung menggunakan metode analisis hierarki proses (Janudianto 2014) hingga memunculkan nilai eigen. Nilai eigen yang tinggi menjadi penentu bahwa faktor tersebut cukup penting dan menjadi ciri khusus dari faktor/variable tertentu bagi masyarakat.

Gambar 10 merupakan hasil dari analisis pengelompokan faktor-faktor yang dapat mengukur kualitas hidup manusia. Laki-laki dan perempuan baik perantau dan bukan-perantau memiliki penekanan yang berbeda mengenai faktor yang dapat menjadi ukuran kualitas hidup manusia. Pendidikan menjadi faktor yang secara langsung dan tidak langsung disepakati baik oleh laki-laki maupun perempuan (Gambar 10A). Lahan dan pendapatan memiliki nilai yang cukup besar dan hubungannya sangat dekat dengan laki-laki daripada dengan kelompok diskusi perempuan. Faktor yang cukup penting dengan kelompok diskusi perempuan adalah aset, meski demikian variasi datanya cukup besar. Perempuan beranggapan bahwa aset seperti kepemilikan dan bentuk rumah, mobil dan jenisnya, kelengkapan perabotan rumah tangga merupakan indikator seseorang dianggap berkualitas hidupnya. Pekerjaan juga merupakan faktor yang disepakati oleh kedua gender, meski demikian faktor ini tidak menjadi faktor utama untuk skala data yang melibatkan pendapat kelompok laki-laki.

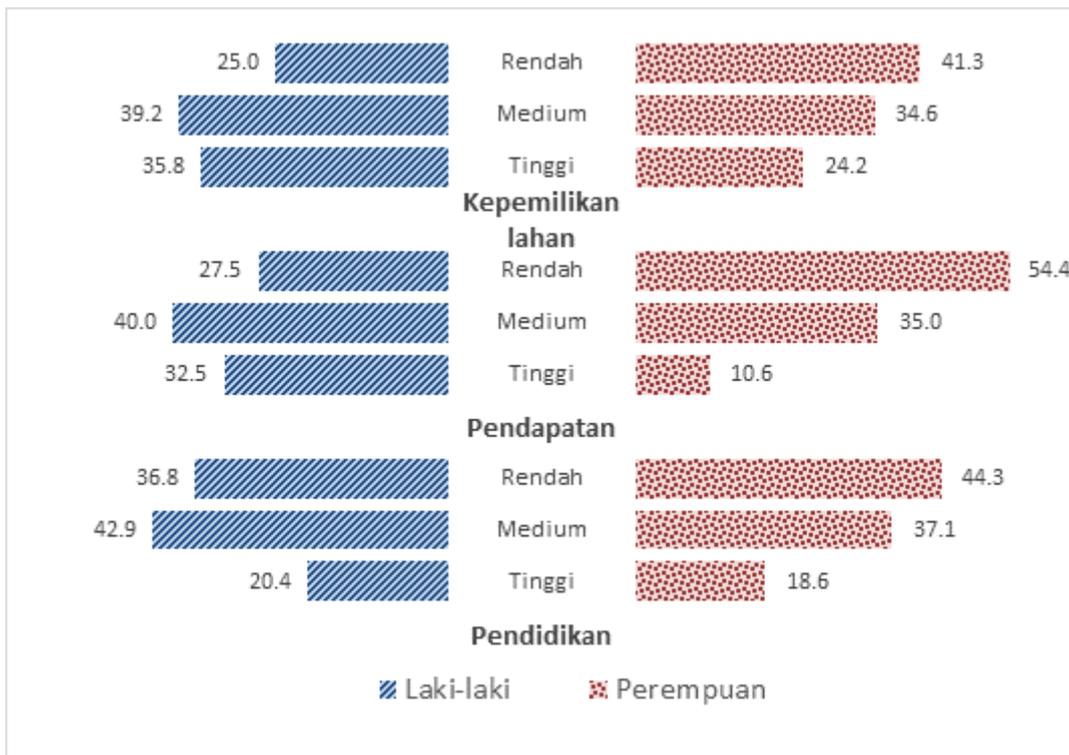
Di Kecamatan Panjalu, pengelompokan pendapat mengenai ukuran kesejahteraan lebih kepada kesamaan status merantau (Gambar 10B). Baik laki-laki dan perempuan yang merantau sependapat bahwa pendidikan merupakan faktor yang penting. Selain itu pendapatan juga menjadi ukuran yang cukup penting meski bukan utama bagi kelompok bukan-perantau. Kelompok masyarakat yang merantau lebih menekankan pada aspek jenis pekerjaan dan kepemilikan lahan. Sebagian dari mereka juga melihat aset menjadi faktor yang penting.

Di Kecamatan Rajadesa, masing-masing gender dan tipologi status merantau memiliki pendapat yang sangat beragam. Namun demikian, Gambar 10C menunjukkan bahwa lahan dan pendapatan merupakan dua faktor utama dalam mengukur kualitas hidup atau tingkat kesejahteraan.

Berdasarkan ukuran secara subyektif tersebut, masyarakat diminta untuk memberikan penilaian secara umum mengenai kondisi kualitas hidup di desa mereka. Informasi ini dapat memberikan gambaran bagaimana masyarakat menilai kualitas hidup perempuan dan laki-laki di dalam kelompok masyarakat tersebut. Gambar 11 menunjukkan hasil dari perkiraan proporsi penduduk perempuan dan laki-laki dan setiap tipologi masyarakat untuk masing-masing tingkatan kualitas hidup, yaitu rendah, menengah dan tinggi. Sebagian besar perempuan (45.6%) berada di kelompok masyarakat dengan kualitas hidup rendah dari ketiga faktor pengukur kualitas hidup (kepemilikan lahan, pendapatan, dan pendidikan). Laki-laki paling banyak berada di kelompok medium (41%) dan yang di kelompok kualitas hidup tinggi berkisar antara 29%.

Dari penilaian subyektif masyarakat, rendahnya kualitas hidup perempuan disebabkan karena pendapatan perempuan lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Bagi masyarakat, kepemilikan lahan perempuan dan laki-laki tidak jauh berbeda, meski secara umum laki-laki memiliki lahan lebih banyak/luas jika dibandingkan perempuan. Hal yang perlu dicatat untuk analisis yang lebih jauh, data ini tidak menunjukkan status legal kepemilikan tanah yang diwujudkan dalam nama pada sertifikat, hanya status kepemilikan normatif. Namun demikian, hal ini sejalan dengan beberapa temuan dalam wawancara rumah tangga, bahwa kepemilikan terhadap tanah untuk perempuan memang cukup diakui, terutama tanah yang diperoleh dari warisan. Untuk tingkat pendidikan, data yang merupakan persepsi ini dapat dibandingkan dengan data yang diperoleh dari survey rumah

tangga. Meski secara umum memang tingkat pendidikan perempuan lebih rendah dari laki-laki, namun perbedaannya tidak signifikan berbeda secara statistik.



Gambar 11. Persepsi masyarakat atas kondisi kualitas hidup pada masing-masing ukuran kualitas hidup subyektif yang utama

6.3 Penilaian petani atas kondisi saat ini

Bagian ini memberikan gambaran bagaimana laki-laki dan perempuan merespon kondisi kesejahteraan yang mereka rasakan selama ini. Gambaran respon ini penting untuk melihat apakah stereotipe gender memang berlaku pada masyarakat di Jawa Barat, dengan gambaran masyarakat yang lebih spesifik yaitu masyarakat pekebun dan perantau. Dalam ranah gender, gambaran kesejahteraan masyarakat dan bagaimana mereka merespon kondisi mereka mampu menunjukkan bagaimana kualitas hidup masyarakat yang mungkin berbeda antar gender. Studi ini juga ingin melihat kekhasan antar gender (jika ada) mengenai situasi dan kondisi mereka yang menjadi latar belakang kesejahteraan mereka. Studi ini bermanfaat untuk memberikan informasi mengenai bagaimana pola pembangunan yang lebih ramah gender sehingga dampak dari pembangunan tersebut dapat lebih seimbang bagi perempuan dan laki-laki.

Gambaran ini diawali dengan mengungkapkan bagaimana kondisi kesejahteraan di setiap tipologi kelompok masyarakat untuk berbagai kategori kehidupan yang meliputi beberapa aspek dasar dalam kehidupan manusia seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, pendapatan dan kehidupan sosial dan agama. Persepsi responden ditunjukkan dengan melihat tingkat kepuasan mereka terhadap kondisi kesejahteraan mereka untuk setiap aspek (*satisfaction factor*). Selain itu kebahagiaan (*happiness*) mereka dalam merespon kondisi kesejahteraan juga dilihat. Terakhir, adalah tingkat optimisme

(*optimism*) responden, apakah dengan kondisi saat ini mereka bisa yakin bahwa masa depan mereka akan lebih baik. Tingkat kepercayaan dari respon responden dan proses diskusi sekitar 85% dengan pertimbangan cara bertanya yang berbeda antar interviewer dan juga situasi dan kondisi wawancara yang sangat mempengaruhi jawaban dari responden.

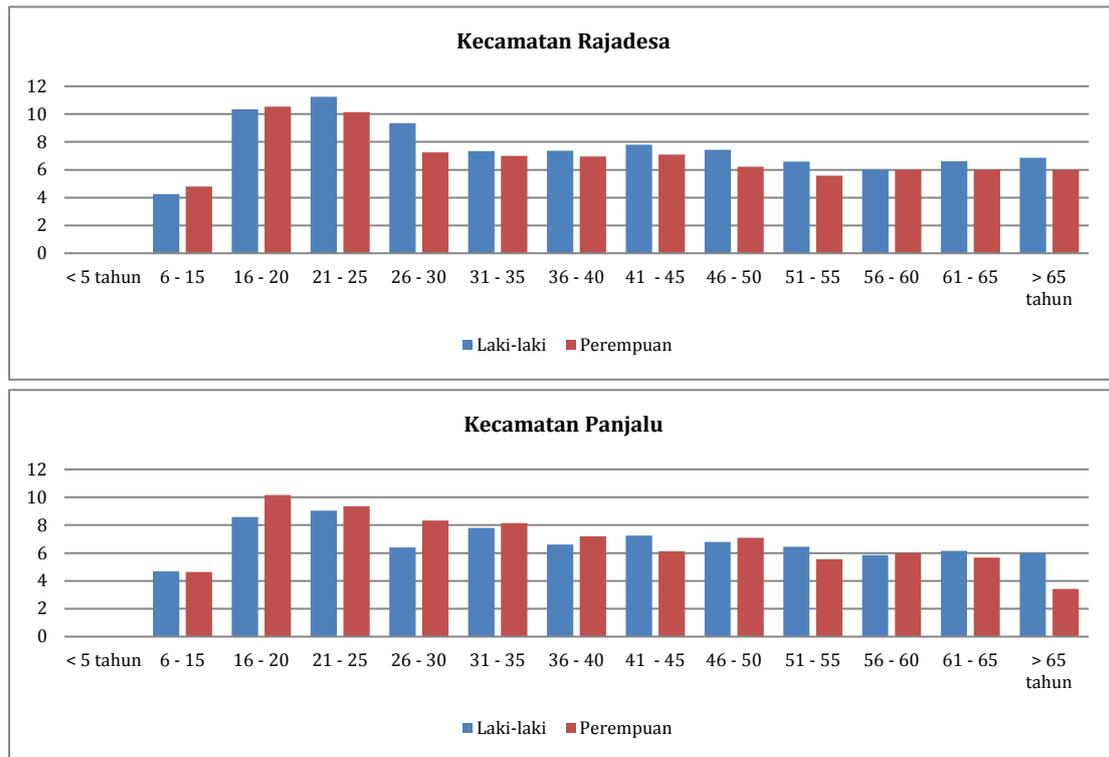
6.3.1 Pendidikan

Secara keseluruhan, di lokasi penelitian, tingkat pendidikan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Data ini dilihat dari lamanya waktu yang ditempuh dalam mengenyam pendidikan untuk seluruh anggota keluarga responden. Secara statistik, perbedaan lama pendidikan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda secara nyata (menggunakan Mann Whitney) adalah di Kecamatan Rajadesa dan pada tipologi/kelompok masyarakat yang merantau, dengan responden sebagai perantau (lihat Tabel 1). Nampaknya kesempatan pendidikan di Kecamatan Rajadesa masih lebih tinggi untuk laki-laki daripada untuk perempuan. Namun demikian, pada kelompok masyarakat yang tidak merantau, perempuan memiliki kecenderungan lama sekolah yang lebih tinggi daripada laki-laki. Perempuan pada kelompok bukan-perantau ini memiliki peluang bersekolah sedikit lebih lama, karena mereka tidak merantau. Sedangkan kaum laki-lakinya, meski tidak merantau, mereka biasanya memilih langsung terjun bekerja di kebun atau bekerja di kegiatan non-pertanian yang ada di desa.

Jika kita melihat Gambar 12, dimana lamanya masa sekolah di setiap rentang umur dibedakan, terlihat bahwa dari tahun ke tahun, perempuan mulai mengenyam pendidikan formal di sekolah lebih lama. Kesempatan sekolah yang mulanya diprioritaskan untuk laki-laki sekarang mulai memprioritaskan perempuan. Kesadaran kesetaraan gender mulai muncul di masyarakat. Hanya saja, jika melihat data per-kecamatan, memang di Kecamatan Rajadesa, meningkatnya lama belajar perempuan baru mulai dirasakan oleh generasi yang berusia 16 – 20 tahun. Di Kecamatan Panjalu, meningkatnya lama belajar perempuan sudah mulai dirasakan oleh generasi yang saat ini berusia 36 – 40 tahun. Analisis lebih jauh menarik untuk dilakukan, untuk melihat perbedaan di kedua kecamatan ini apakah memang dipengaruhi oleh pola migrasi-keluar yang juga berbeda. Studi ini belum mencoba menelusuri perbedaan tersebut.

Tabel 4 Lamanya masa sekolah dan hasil uji statistik

Kelompok		Laki-laki	Perempuan	Beda nyata pada nilai alfa 0.05 (Mann Whitney)
Per-Kecamatan	Kecamatan Panjalu	7.03	6.9	
	Kecamatan Rajadesa	7.43	6.97	Ya
	Total	7.14	6.88	
Per-Tipologi masyarakat	Migran utama	7.3	6.79	Ya
	Migran - anggota keluarga	7.48	7.38	
	Bukan-perantau	6.73	6.77	



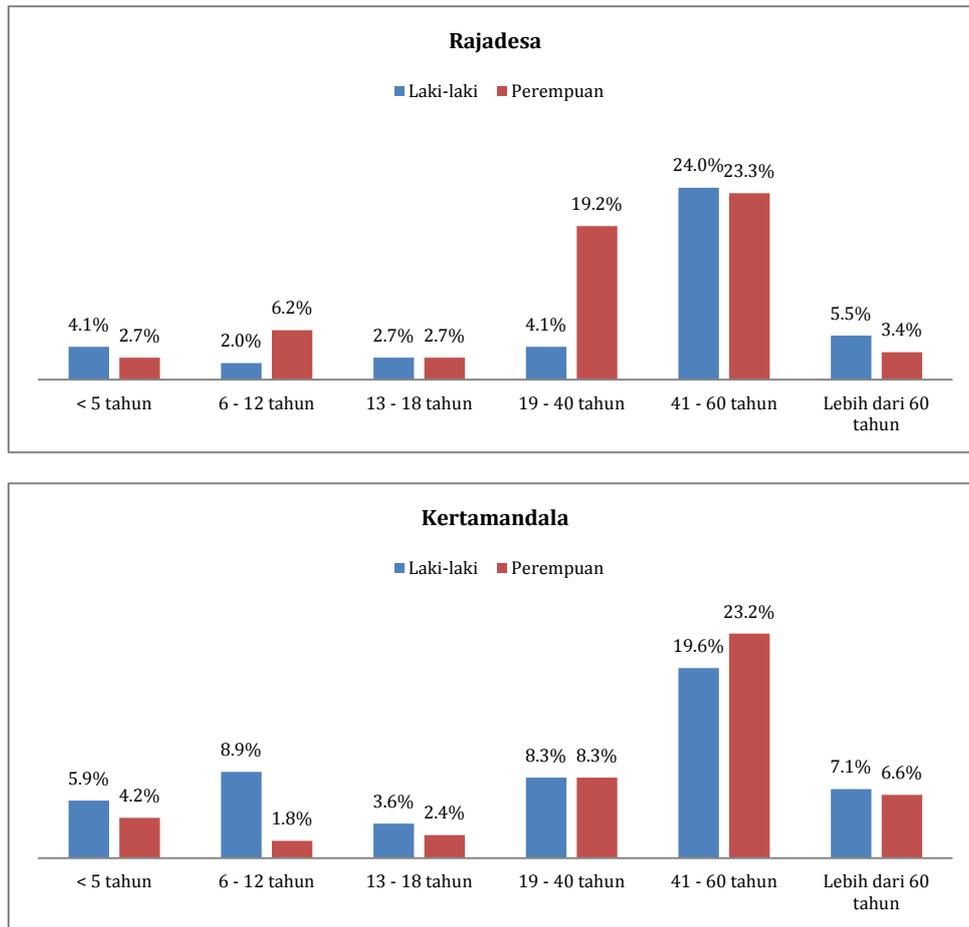
Gambar 12. Lama masa sekolah untuk setiap kategori umur di masing-masing Kecamatan

Respon responden terhadap situasi dan kondisi pendidikan yang mereka alami saat ini secara umum hampir mirip antara laki-laki dan perempuan. Level kepuasan, kebahagiaan dan optimisme hampir sama diantara masing-masing gender. Dari hasil observasi lapangan dan tinjauan data dari Kecamatan Dalam Angka, fasilitas pendidikan di kedua kecamatan sudah baik. Sekolah hingga tingkat SMA tersedia di setiap kecamatan. Pilihan sekolah ke lokasi sekolah yang lebih jauh pun dilakukan, terutama untuk rumah tangga yang memiliki tingkat kesejahteraan tinggi.

6.3.2 Kesehatan

Data yang menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat di kedua kecamatan diperoleh dari data semua anggota rumah tangga yang menjadi responden. Dalam satu tahun terakhir ini, ada sekitar 51.59% perempuan dari total anggota rumah tangga responden yang mengakses pelayanan kesehatan masyarakat seperti bidan desa, puskesmas, dokter praktek terdekat, maupun rumah sakit. Data di kedua kecamatan menunjukkan perbedaan yang cukup menarik, dimana di Kecamatan Panjalu, laki-laki justru lebih banyak (53,37%) mengakses sarana kesehatan tersebut, sementara di Kecamatan Rajadesa, perempuanlah yang lebih banyak mengakses, dengan presentasi berkisar 57%. Jika dipecah ke dalam kelompok umur sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 13, sarana kesehatan diakses oleh masyarakat dalam kelompok umur 19 – 60 tahun. Di Kecamatan Panjalu, terlihat jelas bahwa perempuan dan laki-laki pada kelompok umur 41 – 60 tahun paling banyak mengakses sarana-sarana kesehatan, baik untuk kasus kecelakaan maupun penyakit. Di Rajadesa, potret yang ditampilkan sedikit berbeda, perempuan di usia 19 – 40 tahun yang banyak mengakses sarana kesehatan,

sementara laki-laki dan perempuan di rentang umur 41 – 60 tahun tidak terlalu jauh berbeda jumlahnya dalam mengakses sarana kesehatan.



Gambar 13. Persentase anggota rumah tangga responden yang mengakses sarana kesehatan satu tahun terakhir berdasarkan kelompok umur

Tingkat kepuasan responden di kedua kecamatan terhadap kondisi kesehatan dan pelayanan kesehatan mereka saat ini cukup signifikan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Pada umumnya perempuan merasa lebih puas daripada laki-laki. Perbedaan yang cukup signifikan antara perempuan dan laki-laki juga ditemukan di kelompok masyarakat yang merantau dengan migran utama adalah responden yang bersangkutan, serta di masyarakat bukan-perantau. Sementara itu, tingkat bahagia dalam menghadapi kondisi kesehatan mereka terkini tidak terlalu signifikan berbeda antara perempuan dan laki-laki.

Untuk tingkat optimisme, perbedaan yang signifikan adalah pada kelompok masyarakat yang tidak merantau. Meski demikian data untuk tiap kecamatan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan kurang puasnya laki-laki adalah beberapa pelayanan kesehatan yang meski dekat dan mudah diakses namun secara kualitas rendah. Mereka mengharapkan adanya peningkatan pelayanan kesehatan yang berada di lokasi mereka. Sebagian responden lainnya menyatakan bahwa bilamana mereka menginginkan pelayanan kesehatan yang lebih baik, maka mereka harus mengakses sarana kesehatan yang lokasinya jauh dari desa. Namun demikian, sejatinya

hal ini tergantung dari jenis penyakit yang dihadapi oleh responden. Nampaknya, jika kondisi penyakit semakin parah ataupun pada kasus kecelakaan, pelayanan kesehatan di tingkat desa dan kecamatan masih belum cukup memadai. Pendapat seperti itu bukannya tidak muncul dari responden perempuan, namun karena kebanyakan dari mereka beranggapan bahwa sarana yang ada memang yang paling mungkin mereka akses. Jika mereka harus mengakses sarana kesehatan yang lebih jauh dan lebih baik maka biayanya akan lebih tinggi.

6.3.3 Lingkungan

Observasi dan wawancara mendalam menunjukkan bahwa kondisi lingkungan alam di kedua kecamatan berada dalam kondisi yang baik. Dari segi kesuburan tanah, 71% responden menilai kondisi tanah di desa mereka cukup subur, sementara yang berpendapat bahwa kondisi tanah mereka sama sekali kurang subur ada sekitar hampir 14%. Dari segi kualitas udara, sebesar 72.0% menyatakan bahwa kondisi udara di desa mereka cukup baik, dan 21% menyatakan kondisinya sangat baik. Dari segi keragaman hayati, 54.7% masyarakat menilai bahwa jenis tanaman di desa mereka masih cukup beragam dengan kelimpahan yang juga masih cukup banyak. Sekitar 22.7% menilai bahwa tanaman yang ada di desa mereka sudah mulai berkurang keragamannya, dan sisa responden lainnya berpendapat bahwa kondisi keragaman hayati sudah sangat berkurang.

Secara umum, dalam menilai lingkungan baik laki-laki maupun perempuan hampir sama dan tidak ada perbedaan secara signifikan, meski secara umum perempuan memberikan apresiasi lebih terhadap tingkat kepuasan, bahagia dan optimisme menuju lingkungan lebih baik. Perbedaan apresiasi antara perempuan dan laki-laki terdapat di Kecamatan Panjalu, dimana perempuan yang lebih banyak tinggal di desa merasa lebih dekat dengan lingkungannya dibandingkan dengan laki-laki yang banyak merantau.

6.3.4 Kehidupan sosial

Kegiatan di desa merupakan satu bentuk modal sosial yang memungkinkan masyarakat desa sebagai masyarakat patembayan untuk bekerja bersama dan gotong royong memecahkan segala permasalahan sosial. Berbagai diskusi menyebutkan bahwa modal sosial di pedesaan lebih kuat daripada di daerah perkotaan yang masyarakatnya lebih heterogen. Bagian ini mencoba melihat bagaimana potret kehidupan sosial/bermasyarakat dan bagaimana setiap rumah tangga petani berkiprah di dalamnya. Di Kabupaten Ciamis secara umum, dan di Kecamatan Panjalu dan Rajadesa, hampir semua lapisan masyarakat berkiprah dalam kehidupan sosial masyarakat. Kegiatan utama yang ada di desa adalah kegiatan gotong royong dalam membangun fasilitas umum, kelompok keagamaan (yasinan, qasidah, dan pengajian rutin), kelompok olah raga yang tergabung dalam kegiatan kepemudaan, kelompok tani dan kelompok profesi lainnya (kelompok petani kopi, petani kayu, petani kolam/tambak, dan peternak), arisan atau kelompok pemodal, serta juga yang aktif dalam kelembagaan formal dan non formal di desa, dan yang terakhir adalah kelompok PKK.

Secara umum, keterlibatan perempuan dalam kelompok kemasyarakatan masih lebih rendah dari laki-laki. Hal ini terutama terlihat pada kegiatan kelompok tani atau kelompok profesi dimana keterlibatan

perempuan hanya sekitar 22%. Di dalam persentase ini, terdapat satu kelompok profesi yang memang dibentuk khusus untuk perempuan. Namun demikian, keterwakilan perempuan di dalam kelompok tani yang bukan khusus untuk perempuan cukup rendah. Salah satu faktornya diperkirakan karena masih dianggap rendahnya peran perempuan dalam kegiatan pertanian atau perkebunan. Perwakilan perempuan yang memiliki jabatan atau menjadi aparat pemerintahan desa dan berbagai organisasi terkait pembangunan desa lainnya pun masih cukup kecil (14.8%). Aparat pemerintahan desa masih didominasi oleh laki-laki. Perempuan bisa menjadi aparat namun masih dalam posisi pekerjaan yang bersifat administratif, belum ada yang menempati posisi strategis.

Kelompok PKK merupakan kelompok khusus perempuan dimana perempuan dibina melalui berbagai kegiatan pelatihan yang berhubungan dengan keterampilan memasak, kerajinan tangan, dan pengasuhan anak. Tidak semua masyarakat terlibat dalam kelompok PKK, hanya sebagian masyarakat yang aktif yang terlibat dalam kegiatan PKK. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan keagamaan di kedua kecamatan cukup tinggi jika dibandingkan dengan laki-laki. Pengajian rutin kebanyakan dilakukan di waktu pagi hari dan hampir di setiap dusun sehingga memungkinkan bagi perempuan untuk ikut serta.

Tingkat kepuasan, kebahagiaan dan optimisme responden dalam menjalani kehidupan sosial yang dirasakan perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Meski demikian perbedaan diantara keduanya tidaklah nyata secara statistik (menggunakan Mann Whitney).

6.3.5 Pendapatan

Studi ini melihat dari keseluruhan pendapatan rumah tangga yang ada, berapa besar kontribusi perempuan dan kontribusi laki-laki. Namun demikian, dalam sebagian wawancara yang dilakukan, baik perempuan maupun laki-laki enggan menyebutkan pendapatan mereka merupakan kontribusi perempuan atau laki-laki saja, namun sebagai kontribusi bersama. Selanjutnya, pembahasan dalam bagian ini akan melihat seberapa besar kontribusi perempuan, laki-laki dan bersama berdasarkan persepsi para responden. Yang disebut sebagai kontribusi bersama adalah pendapatan yang menurut persepsi responden tidak dapat dipilah apakah pendapatan tersebut berasal dari laki-laki dan perempuan. Sekitar 12% dari pendapatan rumah tangga merupakan kontribusi perempuan, dan 53% merupakan kontribusi laki-laki, dan sisanya adalah pendapatan bersama.

Dalam pendapatan rumah tangga, kontribusi perempuan sudah cukup diperhitungkan meski dalam banyak hal nilai kontribusinya masih terlihat kecil. Pendapatan rumah tangga yang diperoleh dari sumber penghidupan kegiatan agroforest atau kebun campur umumnya dianggap merupakan pendapatan laki-laki (disebutkan oleh 38.7% responden) dan atau pendapatan bersama (disebutkan oleh 38.8% responden). Hanya sekitar 16.3% responden yang menyebutkan bahwa pendapatan dari kegiatan kebun dan mengambil hasil hutan sebagai pendapatan perempuan. Kontribusi pendapatan dari perempuan umumnya dinyatakan berasal dari sumber pendapatan dari sawah atau tanaman hortikultur, pendapatan non pertanian seperti dari salon, warung, dan menjual perhiasan yang memang umum dilakukan oleh perempuan, serta buruh tani. Sebagian besar pengamat gender menyebutkan bahwa ini bisa memperkuat stereotipe yang diberikan dimana perempuan lebih cocok untuk pekerjaan

bertani yang di dekat rumah dan berhubungan dengan tanaman pangan, sementara laki-laki lebih cocok untuk pekerjaan yang berhubungan dengan tanaman komoditi. Pendapatan laki-laki dari sumber penghidupan non pertanian kebanyakan dikontribusikan dari jenis pekerjaan bengkel, usaha dagang skala besar (jual-beli/tauke kopi dan tanaman komoditi lainnya, terutama kayu), ojeg atau usaha transportasi lainnya. Hal ini tentu saja sesuai dengan bidang kerja yang umum diakses oleh laki-laki.

Data menunjukkan bahwa nilai pendapatan laki-laki lebih besar dari nilai pendapatan perempuan. Jika rata-rata pendapatan laki-laki di Panjalu sekitar Rp 6,539,531 dari pendapatan perempuan, maka pendapatan perempuan sekitar 50.8% dari pendapatan tersebut. Informasi ini menunjukkan bahwa jenis pekerjaan yang dianggap merupakan pekerjaan laki-laki memiliki nilai jumlah pendapatan yang lebih tinggi, sedangkan pekerjaan yang biasa dilakukan perempuan, lebih bersifat mendukung pemenuhan kebutuhan subsisten. Padi, sebagai tanaman pangan, biasa dihasilkan secara subsisten oleh perempuan, dan jika ada hasil yang bisa melebihi kebutuhan pangan tahunan barulah dijual.

Dalam merespon besar kecilnya pendapatan yang diperoleh para responden dalam studi ini, perempuan dan laki-laki memberikan respon yang relatif sama secara umum, namun di masing-masing kecamatan terdapat sedikit perbedaan yang cukup signifikan. Di Kecamatan Rajadesa, laki-laki lebih merasa puas (dengan nilai eigen untuk kepuasan 2.25) dibandingkan dengan perempuan (1.93), dengan perbedaan yang signifikan secara statistik (dengan alpha 0.05). Sedangkan di Kecamatan Panjalu, perempuan justru merasa lebih puas (nilai eigen untuk kepuasan 2.15 dan laki-laki dengan nilai eigen untuk kepuasan 1.79) dengan perbedaan yang cukup signifikan. Nilai eigen untuk bahagia dan optimisme tidak signifikan berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Tabel 5 Kontribusi perempuan, laki-laki dan bersama (laki-laki dan perempuan) di dalam pendapatan rumah tangga per-tipologi masyarakat (dalam rupiah per-tahun)

	Panjalu			Rajadesa			Total		
	Laki-laki	Perempuan	Bersama	Laki-laki	Perempuan	Bersama	Laki-laki	Perempuan	Bersama
	Mean	Mean	Mean	Mean	Mean	Mean	Mean	Mean	Mean
Migran utama	20,036,250	9,334,375	10,863,333	17,387,784	6,341,209	17,638,303	5,126,190	2,710,778	3,299,410
Migran anggota keluarga	16,270,486	4,938,471	9,357,143	13,130,000	3,803,100	8,594,556	7,757,091	3,802,000	6,168,197
Bukan-perantau	18,923,563	5,982,596	16,470,833	16,611,818	7,068,929	11,907,712	6,811,716	3,221,677	4,217,526

Tabel 6 Kontribusi perempuan, laki-laki dan bersama dalam setiap struktur pendapatan rumah tangga (dalam rupiah per-tahun)

	Panjalu			Rajadesa			Total		
	Laki-laki	Perempuan	Bersama	Laki-laki	Perempuan	Bersama	Laki-laki	Perempuan	Bersama
Pertanian	2,370,410	945,238	3,753,596	1,918,333	1,480,833	2,226,558	2,296,095	1,192,436	2,799,197
Hutan/Agroforestri	3,505,533	708,333	3,594,118	5,060,879	1,161,206	6,713,187	4,256,390	1,004,442	6,110,639
Peternakan	3,816,167	306,563	5,291,071	3,166,818	970,750	1,560,927	3,556,427	749,354	2,935,191
Pertanian bukan lahan	5,197,067	5,711,641	18,740,714	10,203,898	7,597,632	8,686,667	12998582.09	6,642,390	11,885,682
Non-pertanian	5,417,167	2,558,636	6,983,333	3,791,000	2,498,889	2,421,000	4604083.333	2,531,750	3,665,273
Remittances	4,971,429	5,145,000	6,818,438	12,717,241		5,653,846	8912280.702	5,204,348	6,482,000

7. Perempuan dan laki-laki: ketimpangan vs kesejahteraan?

Berbicara masalah gender di Indonesia tidak seperti membicarakan isu gender seperti di berbagai negara lain yang memang menunjukkan ketimpangan yang sangat tinggi antara laki-laki dan perempuan. Seperti di India, dengan berbagai fakta yang menunjukkan bahwa perempuan mendapat kesempatan jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Di Indonesia secara umum, dan khususnya di lokasi penelitian ini, perempuan dan laki-laki memiliki kondisi yang berbeda namun tidak signifikan. Masyarakat Sunda memiliki sistem bilateral berbasis Islam, memiliki pembagian kerja yang cukup proporsional dan bersifat komplementer antara laki-laki dan perempuan baik di tingkat rumah tangga maupun di lahan mereka sebagai sumber mata pencarian utama. Namun demikian, masih ada beberapa aspek yang kurang mendukung sehingga *gap* atau disparitas dalam pembangunan wilayah masih terjadi antara laki-laki dan perempuan, terutama pada kelompok-kelompok tertentu. Memahami disparitas gender pada kelompok masyarakat tertentu dapat menunjukkan bahwa permasalahan gender memang secara kondisional ada dan perlu diperhatikan dalam program pengembangan dan pembangunan wilayah.

7.1 Merantau sebagai alternatif penghidupan

Merantau merupakan sebuah strategi dalam rumah tangga untuk meningkatkan kehidupan ekonomi. Elmhirst (2008:69) dalam studinya pada masyarakat transmigran Lampung memperkenalkan konsep 'multi-locality' yang melihat bahwa merantau terjadi karena interkoneksi jaringan yang dibangun rumah tangga dan komunitas petani dalam masyarakat baik di daerah asalnya maupun dengan lingkungan tempat tinggal mereka yang baru.

Dalam kaitannya dengan merantau sebagai satu alternatif untuk meningkatkan sumber pendapatan rumah tangga, berbagai diskusi menunjukkan bahwa perempuan seringkali mengalami beban lebih berat karena mereka harus merantau dan atau ada sebagian anggota keluarganya yang merantau. Studi ini mencoba memahami hal tersebut dari perspektif lain. Studi Mulyoutami (2014a) di daerah yang sama melihat tiga tipologi masyarakat perantau kelompok perantau berbasis pada pertanian, perantau berbasis non pertanian dengan modal (membuka usaha sendiri) dan perantau berbasis non pertanian tanpa modal (biasanya bekerja sebagai tenaga kerja untuk perantau yang membuka usaha sendiri). Kelompok perantau yang membuka usaha sendiri biasanya sudah memiliki modal cukup besar dan berasal dari ekonomi menengah ke atas, sedangkan kelompok perantau yang menjadi tenaga kerja upahan bagi perantau lain berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Untuk memahami bagaimana perubahan dan perbedaan relasi gender dalam masyarakat yang merantau kita perlu melihat dalam ketiga tipologi masyarakat perantau tersebut.

Hasil studi Fauziyah dkk (2015) dari kegiatan studi yang dilakukan paralel dengan studi ini mengindikasikan bahwa, secara umum, pengambilan keputusan untuk berbagai kegiatan kebun dan kegiatan yang berbasis lahan tetap didominasi oleh laki-laki, dan keputusan yang berhubungan dengan

pemenuhan kebutuhan domestik berada di tangan perempuan (Fauziyah dkk 2015). Temuan ini cukup lazim sebagaimana juga temuan Mulyoutami (2012) untuk daerah lain di Sulawesi. Perbedaan penekanan dalam pengambilan keputusan ini sejalan dengan pola pembagian kerja yang menurut hemat penulis masih cukup proporsional. Pekerjaan yang berhubungan dengan pengelolaan kebun kopi dan kebun campur kebanyakan menjadi tanggung jawab laki-laki meski perempuan memiliki kontribusi. Pada keluarga yang merantau, pola pengambilan keputusan dapat berbeda tergantung dari model migrasi-keluar atau merantau yang mereka lakukan. Untuk memahami lebih jauh mengenai perbedaan peran gender pada keluarga perantau, diskusi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu perantau yang berbasis lahan dan perantau yang melakukan kegiatan non pertanian.

7.1.1 Keluarga perantau dalam komunitas dengan sumber penghidupan berbasis lahan

Pembagian peran dalam keluarga perantau yang tujuan merantaunya untuk berkebun kopi atau mengelola lahan di tempat lain cukup proporsional. Kegiatan merantau yang dilakukan secara musiman memberi gambaran pembagian kerja yang jelas. Perempuan ikut merantau hanya di waktu-waktu panen, sementara pada saat perawatan lahan atau tanaman, perempuan tidak perlu ikut serta. Laki-laki dan perempuan bersama-sama memanen kopi, mengupas kulit dan menjemur kopi yang telah dipanen. Sementara itu, di waktu mereka sedang tidak merantau, perempuan secara penuh bertanggung jawab mengatur keperluan domestik keluarga. Sebagian dari mereka beraktivitas di sawah, sebagian lainnya bisa berjualan, seperti jual makanan dan barang-barang di pasar.

Pembagian kerja yang proporsional ini juga ditunjukkan dari pembagian ruang kerja bagi perempuan dan laki-laki. Perempuan, karena masih harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan domestik, lebih memilih ruang kerja yang secara jarak tidak jauh dari tempat tinggal mereka serta secara fisik dapat mereka capai. Dengan demikian tanggung jawab domestik dan tanggung jawab produktif tetap dapat dilakukan oleh perempuan secara proporsional.

Pada keluarga perantau, pengambilan keputusan atas lahan merupakan tanggung jawab penuh laki-laki. Perempuan dapat memutuskan pada saat-saat tertentu bila memang diperlukan. Karena tipe merantau yang bersifat musiman memungkinkan penundaan pengelolaan lahan pada waktu yang memang memungkinkan laki-laki untuk bisa melakukan.

7.1.2 Keluarga perantau yang membuka usaha di kota

Kelompok perantau ini umumnya padat modal. Mereka adalah kelompok masyarakat yang memiliki sumber daya lebih jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Mereka umumnya memiliki lahan yang banyak dan atau luas. Pengelolaan lahan umumnya diberikan kepada keluarga dekat, dan atau kerabat lain yang tinggal di desa. Pada kelompok ini umumnya seluruh anggota keluarga ikut merantau dan tipe migrasi-keluar yang dilakukan adalah permanen. Relasi gender tetap sama dari sebelum dan sesudah merantau.

7.1.3 Keluarga perantau musiman atau temporer

Keluarga ini biasanya merupakan rumah tangga baru atau rumah tangga dari kelompok ekonomi bawah. Pekerjaan non pertanian diperlukan untuk menghasilkan uang tunai bagi keperluan rumah tangga harian. Sebagian dari mereka awalnya merupakan komunitas pengelola kebun. Pada komunitas ini sejatinya pembagian kerja gender menjadi kurang proporsional. Perempuan, yang tidak merantau, mendapatkan tanggung jawab lebih untuk mengelola kebun yang mereka miliki. Meski pengambilan keputusan tetap diutamakan pada laki-laki, namun tanggung jawab pengelolaan tetap dilakukan oleh perempuan. Disamping mereka harus bertanggung jawab untuk hal-hal domestik/rumah tangga, mereka harus mencurahkan perhatian untuk mengelola kebun. Bilamana mereka tidak melakukan kegiatan tersebut sendiri, mereka bisa meminta bantuan tenaga dari luar rumah atau tenaga upahan.

Beban pekerjaan perempuan yang semakin berat, dengan pembagian yang menjadi tidak lagi proporsional, semakin diperparah dengan keadaan bahwa pendapatan mereka dari kebun tetap sebagai atas nama laki-laki. Padahal, curahan waktu yang mereka berikan untuk berkebun cukup besar namun karena pendapatan berkebun merupakan pendapatan laki-laki maka tetap saja disebut sebagai pendapatan laki-laki. Hal ini menunjukkan masih kecilnya apresiasi yang diberikan baik oleh masyarakat, maupun oleh perempuan itu sendiri untuk kontribusinya.

Pembagian kerja yang tidak proporsional bukan suatu yang dikehendaki namun tidak terelakan. Satu hal yang mungkin bisa mengurangi ketidakproporsionalan ini adalah bahwa masyarakat dan perempuan harus mencoba untuk mengapresiasi kontribusi perempuan dalam memberikan pendapatan rumah tangga. Jadi, sebagaimana disebutkan oleh Colfer dkk (2014) pemahaman gender yang kuat di tingkat masyarakat dan kerjasama yang baik antar gender dapat menjadi basis pengakuan gender. Dengan semakin tingginya apresiasi terhadap kontribusi perempuan sebagai petani maka akan semakin mempersempit angka disparitas gender.

7.2 Lahan sebagai simbol kesejahteraan (*well-being*)

Sebagai masyarakat agraris, lahan merupakan salah satu faktor penting yang dapat mengukur level kualitas hidup seseorang sebagaimana juga telah disebutkan pada bagian lain dalam tulisan ini. Komunitas perantau (*out-migrant*) juga tetap melihat lahan sebagai simbol kesejahteraan masyarakat, meski tidak setinggi pada komunitas pengelola kebun (*non-migrant*). Ketergantungan komunitas terhadap lahan serta pola hidup 'urban' telah menggeser pemahaman dan kebutuhan mereka atas lahan. Meski demikian, tidak sedikit kelompok perantau yang telah mampu mengakumulasi modal berupaya mengakumulasi lahan yang kemudian lahan tersebut dikelola oleh keluarga atau kerabat di desa.

Pentingnya memastikan perempuan memiliki hak atas kepemilikan lahan ditekankan di berbagai belahan dunia (Agarwal 1995, Rocheleau dan Edmunds 1997, Kiptot 2012, Mulyoutami 2012). Di komunitas Sunda dataran tinggi di Jawa Barat, Mugniesyah (2007) menemukan bahwa persentase lahan yang dimiliki oleh perempuan lebih banyak dari yang dimiliki laki-laki. Fakta bahwa sedikitnya nama perempuan yang masuk ke dalam surat tanah yang dapat menunjukkan legalitas kepemilikan tanah menunjukkan bahwa kesadaran pentingnya kesetaraan dalam mencantumkan nama dalam surat

tanah bagi perempuan dan laki-laki masih kurang. Dalam berbagai wawancara individu dalam studi ini, ditemukan bahwa secara tersirat kepemilikan atas nama perempuan memang cukup banyak diakui, namun belum secara tersurat. Terutama saat lahan yang dimiliki keluarga tersebut diperoleh dengan cara membeli, preferensi pencantuman nama dalam sertifikat lahan masih lebih kepada laki-laki. Hal ini dengan pertimbangan utama bahwa laki-laki merupakan kepala keluarga dan juga berbagai alasan yang bersifat administratif lainnya, seperti lebih mudah untuk pengurusan kredit, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu kesadaran yang lebih luas dan masuk ke berbagai lini kehidupan bahwa perempuan juga memiliki hak yang sama untuk menjadi pemilik tanah.

Selain itu, rendahnya kesadaran ini masih diperparah juga dengan kenyataan masih simpang siurnya status lahan yang dimiliki, karena sebagian besar (70% lebih) hanya memiliki surat pajak dan bukan surat kepemilikan lahan. Masih banyak masyarakat yang belum mengurus kepemilikan lahan karena masih ada ketidakjelasan atas status lahan yang mereka miliki dan atau karena mereka tidak terlalu peduli.

7.3 Kontribusi perempuan dalam pendapatan rumah tangga: tidak tampak atau tidak diperhitungkan

Sejatinya perempuan memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pengelolaan rumah tangga atau disebut sebagai peran domestik. Namun, sebagaimana masih menjadi perdebatan dalam isu gender, kontribusi ini tidak diperhitungkan atau tidak cukup di apresiasi. Yang jauh lebih penting lagi, kontribusi perempuan dalam kegiatan pertanian atau perkebunan juga belum cukup diapresiasi. Hal ini ditekankan oleh Kiptot (2012) dalam kajiannya untuk partisipasi perempuan dalam Agroforest di Afrika. Hal yang sama juga ditekankan oleh Mulyoutami (2012) untuk kondisi di Sulawesi. Rendahnya kontribusi perempuan terhadap pendapatan rumah tangga sebagaimana ditampilkan dalam data BPS yang mengakibatkan rendahnya nilai IPG dan IDG. Hal ini menunjukkan bahwa apresiasi belum cukup ditampilkan. Jika dilihat dari data kontribusi perempuan di pertanian, sejatinya perempuan memiliki kontribusi yang besar dalam pendapatan perkebunan khususnya kebun kopi dan kebun kayu campur kapulaga.

Di level masyarakat sendiri, kontribusi mereka nampaknya juga tidak diperhitungkan. Masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki lebih nyaman menyebutkan pendapatan dari kebun kopi dan kebun campur sebagai pendapatan laki-laki daripada bersama. Studi ini melihat bahwa pendapatan dari kedua jenis lahan ini memiliki kontribusi perempuan (bisa mencapai 40%), dan perlu diperhitungkan. Kontribusi perempuan yang hanya sebagai pendukung menjadi alasan mengapa kontribusi mereka tidak diperhitungkan, namun bila kita lihat lagi secara lebih jauh, kontribusi itu berperan penting untuk meningkatkan produktivitas kebun.

7.4 Siapa lebih sejahtera?

Sebagaimana telah diungkapkan di muka, kualitas hidup (*quality of life*) sangat tipis bedanya dengan kesejahteraan (*well-being*). Faktor penentu kualitas hidup dan kesejahteraan seringkali dipertukarkan dengan mudah. Tidak mudah menentukan siapa yang lebih sejahtera. Kepuasan, kebahagiaan dan

optimisme dalam merespons situasi dan kondisi yang dialami seseorang tidak secara langsung menunjukkan dia sejahtera atau memiliki kualitas hidup tinggi, namun dapat menunjukkan bagaimana masyarakat menilai kehidupannya, apakah mereka lebih melihat secara positif atau negatif, serta juga bagaimana mereka memiliki target dalam kehidupan ekonomi rumah tangga.

Dari uraian sebelumnya terlihat bahwa perempuan memiliki kecenderungan lebih positif dalam memandang masa depan dan menerima kehidupannya. Sementara laki-laki nampak lebih banyak menilai dan ingin mengubah apa yang mereka alami dan hadapi. Hal ini hampir sama dengan pandangan perempuan yang melihat sesuatu dari jangka pendek, selama kebutuhannya saat ini terpenuhi, maka mereka sudah memandang kehidupannya secara positif. Sedangkan laki-laki harus menanggung anak dan istrinya sehingga memiliki pemikiran yang lebih jauh ke depan. Perbedaan sudut pandang ini yang menentukan strategi dalam menghadapi hidup yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Tentu saja perbedaan ini bersifat komplementer.

Hampir dalam setiap diskusi kelompok dinyatakan bahwa perempuan memang lebih terlihat tidak sejahtera, seperti dalam proses diskusi disebutkan bahwa perempuan tidak banyak memiliki lahan dan perabotan. Bilamana ditinjau lebih jauh, masalah kepemilikan lahan dan aset yang lebih sering di atasnamakan kepada pihak laki-laki sehingga perempuan nampak tidak banyak memiliki apa-apa. Pernyataan ‘pendapatan bersama’ atau ‘milik bersama’ yang sering dikemukakan dalam diskusi kelompok terfokus oleh kelompok diskusi perempuan dan laki-laki menunjukkan bahwa masyarakat sejatinya tidak merasa itu pendapatan hanya milik suami atau isteri saja, namun bersama.

Peneliti: kalau dilihat dari kepemilikan lahan, berapa banyak perempuan yang dikelompokkan memiliki kesejahteraan rendah, menengah dan tinggi?

Partisipan diskusi: gimana itu bu... lahan itu kan milik suami dan istri, susah juga kita melihatnya.... kan lahan adalah milik bersama?

Peneliti: jika dihitung milik bersama, adalah milik perempuan juga, tapi kita juga memperhitungkan perempuan yang tidak memiliki keluarga atau suami juga, termasuk janda-janda, seberapa besar perempuan yang dikelompokkan sejahtera rendah, menengah dan tinggi dari kepemilikan lahannya?

Partisipan diskusi: oooh... jadi perempuan paling banyak yang kesejahteraan rendah... kan banyak janda miskin...

Seperti juga pendapatan rumah tangga, kontribusi perempuan dinyatakan lebih kecil sehingga pendapatan mereka pun kecil. Data yang digunakan untuk menganalisis indikator pembangunan manusia dan gender menunjukkan kecilnya kontribusi perempuan dalam pendapatan rumah tangga. Satu hal yang harus dipastikan bahwa kontribusi perempuan dalam kegiatan pertanian dihitung sebagai kontribusi perempuan saja, yang umumnya hanya berasal dari pertanian sawah, palawija, dan sektor dengan nilai usaha tani rendah saja, atau sudah juga melihat pada ‘pendapatan bersama’ yang biasanya berasal dari usaha tani kopi, cengkeh, dan tanaman komoditi lainnya. Hasil hitungan usaha tani yang memilah gender menunjukkan bahwa kontribusi perempuan dalam kegiatan pertanian dan perkebunan sekira 51%, hampir sama dengan laki-laki.

Secara subyektif memang perempuan nampak tidak sejahtera, namun ini lebih dikarenakan dari pemahaman masyarakat mengenai konsep *well-being* dan *quality of life*. Jadi, bilamana kita melihat perempuan dan laki-laki sebagai entitas terpisah, dan senantiasa memperhitungkan sekaligus menghargai kontribusi perempuan baik dari pekerjaan mereka secara aktif maupun pasif, kita akan melihat kondisi bahwa perempuan dan laki-laki sejatinya cukup setara.

Cuplikan wawancara di atas menunjukkan bahwa janda (*female headed household*) cenderung kurang sejahtera, jika dilihat dari lahan. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi janda umumnya memang lebih miskin daripada kelompok lainnya, karena pilihan sumber penghidupan mereka lebih sedikit. Kondisi kesejahteraan rumah tangga di setiap masyarakat berbeda-beda. Dari pengamatan dan diskusi yang telah dilakukan, terlihat bahwa level kesejahteraan masyarakat dari bawah ke atas terlihat pada kelompok perempuan kepala rumah tangga (janda), keluarga lengkap namun miskin, keluarga lengkap dalam ekonomi menengah dan atas. Mulyoutami (dalam proses review) menyatakan bahwa perbedaan kondisi perempuan dan keterlibatan mereka dalam pertanian menentukan kesuksesan mereka dalam kelompok tani dan mengadopsi pengetahuan.

8. Perempuan dan laki-laki: pengetahuan dan pembagian ruang gender

Ruang gender didasari atas pengetahuan dan preferensi setiap kelompok gender yang sangat dipengaruhi oleh tanggung jawab yang merupakan konstruksi sosial budaya. Studi ini menunjukkan adanya pembagian ruang yang jelas bagi laki-laki dan perempuan untuk lebih berkibrah. Pembagian ruang di dalam gender pada kegiatan produktif pertanian/perkebunan dan atau ruang di dalam rumah sangat berhubungan erat pembagian peran dan tanggung jawab yang sudah sangat membudaya di masyarakat. Tanggung jawab perempuan sebagai pengasuh anak, menjadikan area di sekitar rumah, menjadi domain perempuan. Perempuan dapat tetap berkontribusi terhadap kegiatan di kebun tanpa membebani mereka dengan kewajiban lain di luar rumah. Selain itu, preferensi perempuan untuk lebih banyak berkibrah di arena dimana mereka secara fisik mampu dan merasa aman melakukannya.

Massey (2001) merujuk pada makna simbolik dari ruang dan pesan-pesan berbau gender yang terasosiasi. Massey (2001) menggunakan pembedaan ruang di dalam rumah menjadi ruang *private* dan *publik* yang menggambarkan domain dan identitas perempuan dan laki-laki. Rotman (2006) melihat perempuan dan laki-laki memiliki kehidupan yang dinamis dan mengalir (*fluid*) sehingga pembagian ruang *private* dan *publik* menjadi kurang relevan. Temuan dalam studi ini melihat bahwa pembagian ruang di luar rumah yaitu area untuk bertani/berkebun tampak jelas tergantung dari komoditi dan jarak dari tempat tinggal.

Pekarangan merupakan areal atau *space* yang menjadi domain perempuan dan hampir ditemukan di sebagian besar wilayah di Indonesia. Soemarwoto dan Conway (1992) menjelaskan bahwa pekarangan banyak ditemukan terutama di daerah yang menganut sistem matriarki dan bilateral seperti di Minang (Padang), Aceh, Jawa Barat, dan hanya sedikit ditemukan di daerah Sumatera Utara

(patriarki). Di Sumatera Utara, pekarangan terutama ditemukan di bagian belakang rumah sementara bagian depan rumah diperuntukkan untuk tempat pertemuan. Di Ciamis, *buruan* atau frontyard atau halaman depan harus selalu tampil bersih, karena merupakan tempat bermain anak dan sekaligus tempat berkumpulnya anggota keluarga rumah dan tetangga. Pekarangan merupakan tempat interaksi yang melibatkan semua gender dan usia, serta tempat pertemuan dengan tamu dan tetangga.

Laki-laki memiliki kecenderungan untuk mengubah lahan yang produktif untuk lebih ditingkatkan produksinya, sementara perempuan cenderung untuk mengubah lahan yang kurang produktif seperti pekarangan dan kebun kelapa. Dalam hal pengambilan keputusan ini perempuan tampaknya memiliki keinginan untuk berkontribusi dalam sistem produksi di area-area yang secara stereotipe berhubungan dengan domain perempuan, seperti pekarangan dan sawah. Hal ini menunjukkan pentingnya pekarangan bagi perempuan, yaitu tempat yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan lingkungan dan keluarga.

Kebun kayu, kebun kopi dan kebun campur lebih merupakan domain laki-laki namun tidak menjadi prioritas untuk dipertahankan. Proses mengubah kebun ini tidak serta merta dilakukan dalam satu kurun waktu namun bertahap. Kayu yang ditumpangsarikan dengan tanaman komoditi, seperti kopi dan kapulaga, secara perlahan kayu atau tanaman komoditi yang diganti dengan tanaman baru. Demikian juga dengan kebun campur, jenis tanaman yang sudah mati dan atau mulai tidak menguntungkan secara perlahan diganti menjadi jenis tanaman baru.

Villamor (2014) dalam studinya menjelaskan bahwa perempuan memiliki kecenderungan mengubah lahan yang lebih tinggi daripada laki-laki. Pada studi ini, dalam konteks Jawa Barat, kecenderungan yang hampir sama ditemukan namun dalam konteks yang berbeda. Temuan dalam studi ini hampir sama dengan pendapat Trauger (2004) bahwa perempuan terutama lebih terlibat di lahan yang sustainable, dengan sedikitnya keterlibatan mereka dalam penerapan pupuk dan obat kimia. Menurut Trauger (2004), laki-laki cenderung lebih fokus pada lahan produktif. Beberapa highlight dalam temuan ini yang hampir serupa dengan temuan Trauger (2004) sebagai berikut:

- Peningkatan produktivitas kebun lebih banyak diutamakan oleh laki-laki, dimana mereka berupaya meningkatkan hasil produksinya dari kebun yang sudah produktif, sementara perempuan berupaya mengelola lahan pekarangan dengan aplikasi pupuk dan obat kimia yang seadanya. Selain itu, pilihan lahan yang akan diubah oleh laki-laki adalah lahan yang dapat memberikan produksi yang lebih tinggi dengan biaya yang lebih sedikit.
- Perempuan memiliki kerangka berfikir yang difokuskan pada efisiensi kerja, seperti mengubah semak belukar yang tentunya tidak memerlukan banyak tenaga kerja. Serta juga menanam tanaman ekonomis secara bertahap di pekarangan untuk menambah pendapatan lahan. Perempuan memiliki kecenderungan untuk mengganti lahan kelapa yang sama sekali sudah tidak produktif, untuk ditanam tanaman baru.

Jadi bisa disimpulkan dari beberapa pernyataan tersebut, jika perempuan lebih fokus pada solusi yang bersifat jangka pendek dan laki-laki lebih bersifat jangka panjang. Namun demikian, pada konteks masyarakat di Ciamis, meski secara spasial areal dekat rumah sudah menjadi domain perempuan, dan

areal jauh dari rumah merupakan domain laki-laki, namun prinsip bilateral, artinya posisi perempuan dan laki-laki yang cukup seimbang, menjadikan proses jual beli dan konversi lahan tetap memerlukan pertimbangan kedua belah pihak. Konversi lahan dan jual beli lahan tidak serta merta dilakukan tanpa persetujuan dari perempuan. Tulisan ini tidak sepakat dengan pendapat Villamor (2014) bahwa melibatkan perempuan akan membuat konversi lahan menjadi lebih sering terjadi. Pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan atas lahan sangat penting dipertimbangkan, namun dengan penguatan akses mereka terhadap pengetahuan tentang manfaat lahan. Pola komunikasi dalam keluarga penting untuk membangun basis pemahaman masing-masing kelompok gender tentang lahan. Ini jadi satu bukti bahwa dominasi laki-laki yang terlalu kuat terhadap lahan telah mengikis akses perempuan terhadap pengetahuan mengenai fungsi dan manfaat lahan.

9. Upaya ke depan

Secara keseluruhan studi ini melihat bahwa perempuan dan laki-laki di daerah penelitian memiliki hubungan bilateral, yang lebih mengarah ke patriarki. Peran masing-masing gender masih terlihat proporsional dan komplementer. Ketidaksetaraan bisa terjadi lebih karena persepsi subyektif dari masyarakat secara umum yang dipengaruhi dengan budaya patriarki. Relasi antara perempuan dan laki-laki di semua kelompok masyarakat hampir setara, jika beberapa kondisi sebagaimana berikut ini diperhatikan dengan baik:

- Hak perempuan atas lahan lebih diperkuat. Perlu adanya peningkatan pemahaman dari kedua belah pihak, bahwa andil perempuan atas lahan perlu dilegalkan guna menghindari adanya perselisihan paham. Hak waris laki-laki yang lebih dari perempuan dengan pertimbangan bahwa laki-laki sebagai penyandang nafkah utama, meski dalam beberapa aspek memiliki pertimbangan logis, namun seringkali dimanfaatkan untuk memperoleh lahan yang lebih besar dan perempuan dirugikan.
- Memperbesar penghargaan terhadap kontribusi perempuan dalam ekonomi rumah tangga. Sejatinya perempuan memiliki kontribusi besar dalam ekonomi rumah tangga baik secara aktif maupun pasif. Perempuan dan laki-laki sama-sama melakukan strategi untuk mempertahankan bahkan mengembangkan lebih jauh lagi sumber penghidupannya. Semakin kontribusi perempuan terlihat dan di apresiasi, hasil pembangunan yang dicapai akan semakin nyata.
- Perempuan dan laki-laki memiliki pandangan/persepsi, pengetahuan dan strategi menghadapi masalah yang berbeda satu sama lain, namun saling melengkapi. Berbagai upaya pembangunan perlu melibatkan kedua belah pihak untuk mendapatkan hasil yang lebih tepat. Daripada membuat desain pembangunan yang memaksa perempuan untuk terlibat aktif dalam pembangunan di ranah yang tidak membuat mereka nyaman, akan lebih baik jika program pembangunan dilakukan dengan memperkuat pengetahuan, persepsi dan strategi mereka.

Referensi

- [BPS] Biro Pusat Statistik and Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2012. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2005–2011*.
- Abustam MI. 1989. Gerak Penduduk: Pembangunan dan perubahan sosial. Kasus Tiga Komunitas Padi Sawah di Sulawesi Selatan. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).
- Agarwal B. 1995. A field of one's own: Gender and property in South Asia. Cambridge: Cambridge University Press.
- Alkire S, Sarwar M. 2009. Multidimensional measures of poverty and well being. Working Paper for European Commission. http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/future/pdf/7_alkire_final_formatted.pdf
- Berenger V, Verdier-Chouchane A. 2007. Multidimensional measures of Well-Being: Standard of Living and Quality of Life Across Countries. *World Development* Vol. 35 No. 7 pp 1259-1276. Elsevier.
- Colfer CJP, Achdiawan R, Adnan H, Moeliono M, Mulyana A, Mulyoutami E, Roshetko J M, Yuliani L, Balang, LPEMIL. 2014. Preparing the ground for better landscape governance: gendered realities in southern Sulawesi. *Forests, Trees and Livelihoods*, 24:1, 59-83, DOI: 10.1080/14728028.2014.951002. <http://dx.doi.org/10.1080/14728028.2014.951002>
- Costanza R, Fisher B, Ali S, Beer C, Bond L, Boumans R, Danigelis NL, Dickinson J, Elliot C, Farley J, Gayer DE, Glenn LM, Hudspeth T, Mahoney D, McCahill L, McIntosh B, Reed B, Rizvi AT, Rizzo DM, Simpatico T, Snapp, R. 2007. Quality of life: An approach integrating opportunities, human needs, and subjective well-being. *Ecological economics*, 61(2), 267-276.
- De Haas H. 2008. Migration and development: a theoretical perspective. Working Papers 9. International Migration Institute.
- de Royer S, Pradhan U, Fauziyah E, Widyaningsih TS. 2014. Community Based Forest Management (PHBM): Who is benefiting? CBFM, Coffee and migration patterns in Ciamis Regency, West Java, Indonesia. Brief No 44. Bogor, Indonesia. World Agroforestry Centre (ICRAF), Southeast Asia Regional Program.
- Dharmawan AH. 2006. Pendekatan-Pendekatan Pembangunan Pedesaan dan Pertanian: Klasik dan Kontemporer. Tulisan ini dikembangkan dari makalah penulis yang disampaikan pada acara "Apresiasi Perencanaan Pembangunan Pertanian Daerah bagi Tenaga Pemandu Teknologi Mendukung Prima Tani", diselenggarakan di Hotel Jaya-Raya, Cisarua Bogor, 19-25 November 2006.
- Ekadjati E S. 2008. Pancakaki, Asal Usul dan Maknanya. <http://indoculture.wordpress.com/2008/03/19/pancakaki-asal-usul-dan-maknanya/>
- Ellis F. 2003. A Livelihoods Approach to Migration and Poverty Reduction. Paper Commissioned by the Department for International Development (DFID). Contract No: CNTR 03 4890
- Elmhirst R. 2008. Multi-local livelihoods, Natural Resource Management and Gender in Upland Indonesia. In Rouseff BP, Elmhirst R. *Gender, environment and natural resource management: new dimensions, new debates*. London: Earthscan. 67 – 86 pp.

- Fauziyah E, Widyaningsih TS, Mulyoutami E, Awalina D, Lusiana B. 2014. Dinamika penelitian gender di hutan rakyat: pengalaman penerapan metode di Kecamatan Panjalu, Ciamis, Jawa Barat. Presented at Seminar Nasional Agroforestri 5, Ambon, November 2014. . Bogor, Indonesia. World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Program.
- Fauziyah E, Widyaningsih TS, Mulyoutami E, Awalina D, Lusiana B. 2015. Dinamika Pengambilan Keputusan pada Masyarakat Berbasis Kayu Rakyat dengan Migrasi Sirkuler Tinggi. ICRAF Working Paper No.
- Gartaula H N, Visser L, Niehof A. 2011. Socio-cultural dispositions and well-being of the women left behind: A case of migrant households in Nepal. *Social Indicators Research: An International and interdisciplinary Journal for Quality of Life measurement*. 30 p.
<http://link.springer.com/article/10.1007/s1120501198839/fulltext.html>
- Heeren, H.J., 1979. *Transmigrasi di Indonesia [Transmigration in Indonesia]*. Jakarta: PT Gramedia.
- Iaquinta DL, Drescher AW. 2000. Defining the peri-urban: rural-urban linkages and institutional connection. In Groppo P. *Land reform: land settlement and cooperatives. Economic and Social Development Department*. FAO. <http://www.fao.org/docrep/003/x8050t/x8050t02.htm>
- Indrawardana I. 2011. Sunda Wiwitan dalam dinamika zaman. Konferensi Internasional Budaya Sunda II. Revitalisasi Budaya Sunda: Peluang dan Tantangan dalam Dunia Global 19 – 22 Desember 2011.
http://xa.yimg.com/kq/groups/2636369/1184717381/name/KIBS_ira_indrawardana.pdf
- Janudianto, Dewi S, Martini E and Setiawan A. 2014. Understanding gender perspectives in selecting tree species and farming systems using analytic hierarchy process. In: Catacutan D, McGaw E and Llanza M,(eds). *In Equal Measure: A User Guide to Gender Analysis in Agroforestry*. . Los Baños, Philippines. World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Program. P. 59-66
- Kiptot E, Franzel S. 2012. Gender and agroforestry in Africa: who benefits? The African perspective. *Agroforestry-the future of global land use* (pp. 463-496). Springer Netherlands.
- Krishna S. 2004. *Livelihood and gender: Equity in community resource management*. SAGE Publications India.
- Kusworo A. 2014. *Pursuing livelihoods, imagining development : smallholders in Highland Lampung, Indonesia*. Canberra: ANU Press.
- Martini E, Tarigan J, Purnomosidi P, Prahmono A, Surgana M, Setiawan A, Megawati, Mulyoutami E, Meldy BD, Syamsidar, Talui R, Janudianto, Suyanto S, Roshetko JM. 2012. Agroforestry extension needs at the community level in AgFor project sites in South and Southeast Sulawesi, Indonesia. ICRAF Working Paper no 159.
- Massey D. 2001. *Space, place and gender*. Minneapolis: Minnesota University Press. 277p.
- Minahan JB. 2012. *Ethnic Groups of South Asia and the Pacific: An Encyclopedia*. Abc-clio.
- Mugniesyah SSM, Muzuno K. 2007. Access to land in Sundanese community: a case study of upland peasant households in Kemang village, West Java, Indonesia. *Southeast Asian Studies*. Vol 44. No 4. March. 519 – 544 pp.
- Mulyoutami E, Fauziyah E, Widyaningsih TS, Awalina D and Lusiana B. 2014a. Perantau Dan Pengelola Kebun Sebuah Kajian Migrasi Di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Presented at Seminar Nasional

- Agroforestri 5, Ambon, November 2014. . Bogor, Indonesia. World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Program.
- Mulyoutami E, Khususiyah N, Martini E and Suyanto S. 2014b. Gender-specific assessment of natural resources using the pebble game. In: Catacutan D, McGaw E and Llanza M,(eds). In Equal Measure: A User Guide to Gender Analysis in Agroforestry. . Los Baños, Philippines. World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Program. P. 29-34
- Mulyoutami E, Martini E, Khususiyah N, Isnurdiyansyah, Suyanto. 2012. Gender, livelihood and land in South and Southeast Sulawesi. ICRAF Working Paper no 158.
- Mulyoutami E, Roshetko JM, Martini E, Janudianto. In Review. Gender roles and knowledge in plant species selection and domestication: case study in South and Southeast Sulawesi. Submitted to International Forestry Review.
- Mulyoutami, E. 2014c. Jaringan dan keputusan migrasi untuk penguasaan lahan. Kajian komunitas petani coklat migran Bugis di Sulawesi Tenggara. Master Thesis. Bogor Agricultural Institute. Bogor Indonesia
- Pandjaitan NK. 1990. Gerak penduduk wanita pedesaan pada komunitas pertanian lahan kering (Kasus sebuah dusun di Desa Purwaraja, Kecamatan Rajadesa, Kabupaten Ciamis – Jawa Barat). Thesis for Rural Sociology Study, Post Graduate Faculty, Bogor Agricultural Institute.
- Rocheleau D, Edmunds D. 1997. Women, men and trees: Gender, power and property in forest and agrarian landscapes. *World development*, 25(8), 1351-1371.
- Rotman D. 2006. Separate Spheres? In *Current Anthropology* 47(4), 666-674.
- Soemarwoto O, Conway GR. 1992. The Javanese homegarden. *Journal for Farming Systems Research-Extension* 2 (3): 95-118. <http://www.ciesin.org/docs/004-194/004-194.html>
- Sumarti TMC. 1999. Persepsi kesejahteraan dan tindakan kolektif orang Jawa dalam kaitannya dengan gerakan masyarakat dalam pembangunan keluarga sejahtera di pedesaan. Disertasi Program Pascasarjana IPB. Bogor.
- Trauger A. 2004. 'Because they can do the work': Women farmers in sustainable agriculture in Pennsylvania, USA. *Gender, Place & Culture*, 11(2), 289-307.
- Villamor G B, Desrianti F, Akiefnawati R, Amaruzaman S, van Noordwijk M. (2014). Gender influences decisions to change land use practices in the tropical forest margins of Jambi, Indonesia. *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*, 19(6), 733-755.

WORKING PAPERS WITH DOIs

2005

1. Agroforestry in the drylands of eastern Africa: a call to action
2. Biodiversity conservation through agroforestry: managing tree species diversity within a network of community-based, nongovernmental, governmental and research organizations in western Kenya.
3. Invasion of *prosopis juliflora* and local livelihoods: Case study from the Lake Baringo area of Kenya
4. Leadership for change in farmers organizations: Training report: Ridar Hotel, Kampala, 29th March to 2nd April 2005.
5. Domestication des espèces agroforestières au Sahel : situation actuelle et perspectives
6. Relevé des données de biodiversité ligneuse: Manuel du projet biodiversité des parcs agroforestiers au Sahel
7. Improved land management in the Lake Victoria Basin: TransVic Project's draft report.
8. Livelihood capital, strategies and outcomes in the Taita hills of Kenya
9. Les espèces ligneuses et leurs usages: Les préférences des paysans dans le Cercle de Ségou, au Mali
10. La biodiversité des espèces ligneuses: Diversité arborée et unités de gestion du terroir dans le Cercle de Ségou, au Mali

2006

11. Bird diversity and land use on the slopes of Mt. Kilimanjaro and the adjacent plains, Tanzania
12. Water, women and local social organization in the Western Kenya Highlands
13. Highlights of ongoing research of the World Agroforestry Centre in Indonesia
14. Prospects of adoption of tree-based systems in a rural landscape and its likely impacts on carbon stocks and farmers' welfare: The FALLOW Model Application in Muara Sungkai, Lampung, Sumatra, in a 'Clean Development Mechanism' context
15. Equipping integrated natural resource managers for healthy Agroforestry landscapes.
17. Agro-biodiversity and CGIAR tree and forest science: approaches and examples from Sumatra.
18. Improving land management in eastern and southern Africa: A review of policies.
19. Farm and household economic study of Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Indonesia: A socio-economic base line study of Agroforestry innovations and livelihood enhancement.
20. Lessons from eastern Africa's unsustainable charcoal business.
21. Evolution of RELMA's approaches to land management: Lessons from two decades of research and development in eastern and southern Africa
22. Participatory watershed management: Lessons from RELMA's work with farmers in eastern Africa.
23. Strengthening farmers' organizations: The experience of RELMA and ULAMP.
24. Promoting rainwater harvesting in eastern and southern Africa.
25. The role of livestock in integrated land management.
26. Status of carbon sequestration projects in Africa: Potential benefits and challenges to scaling up.

27. Social and Environmental Trade-Offs in Tree Species Selection: A Methodology for Identifying Niche Incompatibilities in Agroforestry [*Appears as AHI Working Paper no. 9*]
28. Managing tradeoffs in agroforestry: From conflict to collaboration in natural resource management. [*Appears as AHI Working Paper no. 10*]
29. Essai d'analyse de la prise en compte des systemes agroforestiers pa les legislations forestieres au Sahel: Cas du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Senegal.
30. Etat de la recherche agroforestière au Rwanda etude bibliographique, période 1987-2003

2007

31. Science and technological innovations for improving soil fertility and management in Africa: A report for NEPAD's Science and Technology Forum.
32. Compensation and rewards for environmental services.
33. Latin American regional workshop report compensation.
34. Asia regional workshop on compensation ecosystem services.
35. Report of African regional workshop on compensation ecosystem services.
36. Exploring the inter-linkages among and between compensation and rewards for ecosystem services CRES and human well-being
37. Criteria and indicators for environmental service compensation and reward mechanisms: realistic, voluntary, conditional and pro-poor
38. The conditions for effective mechanisms of compensation and rewards for environmental services.
39. Organization and governance for fostering Pro-Poor Compensation for Environmental Services.
40. How important are different types of compensation and reward mechanisms shaping poverty and ecosystem services across Africa, Asia & Latin America over the Next two decades?
41. Risk mitigation in contract farming: The case of poultry, cotton, woodfuel and cereals in East Africa.
42. The RELMA savings and credit experiences: Sowing the seed of sustainability
43. Yatich J., Policy and institutional context for NRM in Kenya: Challenges and opportunities for Landcare.
44. Nina-Nina Adoung Nasional di So! Field test of rapid land tenure assessment (RATA) in the Batang Toru Watershed, North Sumatera.
45. Is Hutan Tanaman Rakyat a new paradigm in community based tree planting in Indonesia?
46. Socio-Economic aspects of brackish water aquaculture (*Tambak*) production in Nanggroe Aceh Darrusalam.
47. Farmer livelihoods in the humid forest and moist savannah zones of Cameroon.
48. Domestication, genre et vulnérabilité : Participation des femmes, des Jeunes et des catégories les plus pauvres à la domestication des arbres agroforestiers au Cameroun.
49. Land tenure and management in the districts around Mt Elgon: An assessment presented to the Mt Elgon ecosystem conservation programme.
50. The production and marketing of leaf meal from fodder shrubs in Tanga, Tanzania: A pro-poor enterprise for improving livestock productivity.
51. Buyers Perspective on Environmental Services (ES) and Commoditization as an approach to liberate ES markets in the Philippines.

52. Towards Towards community-driven conservation in southwest China: Reconciling state and local perceptions.
53. Biofuels in China: An Analysis of the Opportunities and Challenges of *Jatropha curcas* in Southwest China.
54. *Jatropha curcas* biodiesel production in Kenya: Economics and potential value chain development for smallholder farmers
55. Livelihoods and Forest Resources in Aceh and Nias for a Sustainable Forest Resource Management and Economic Progress
56. Agroforestry on the interface of Orangutan Conservation and Sustainable Livelihoods in Batang Toru, North Sumatra.

2008

57. Assessing Hydrological Situation of Kapuas Hulu Basin, Kapuas Hulu Regency, West Kalimantan.
58. Assessing the Hydrological Situation of Talau Watershed, Belu Regency, East Nusa Tenggara.
59. Kajian Kondisi Hidrologis DAS Talau, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.
60. Kajian Kondisi Hidrologis DAS Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
61. Lessons learned from community capacity building activities to support agroforest as sustainable economic alternatives in Batang Toru orang utan habitat conservation program (Martini, Endri et al.)
62. Mainstreaming Climate Change in the Philippines.
63. A Conjoint Analysis of Farmer Preferences for Community Forestry Contracts in the Sumber Jaya Watershed, Indonesia.
64. The highlands: a shared water tower in a changing climate and changing Asia
65. Eco-Certification: Can It Deliver Conservation and Development in the Tropics.
66. Designing ecological and biodiversity sampling strategies. Towards mainstreaming climate change in grassland management.
67. Towards mainstreaming climate change in grassland management policies and practices on the Tibetan Plateau
68. An Assessment of the Potential for Carbon Finance in Rangelands
69. ECA Trade-offs Among Ecosystem Services in the Lake Victoria Basin.
69. The last remnants of mega biodiversity in West Java and Banten: an in-depth exploration of RaTA (Rapid Land Tenure Assessment) in Mount Halimun-Salak National Park Indonesia
70. Le business plan d'une petite entreprise rurale de production et de commercialisation des plants des arbres locaux. Cas de quatre pépinières rurales au Cameroun.
71. Les unités de transformation des produits forestiers non ligneux alimentaires au Cameroun. Diagnostic technique et stratégie de développement Honoré Tabuna et Ingratia Kayitavu.
72. Les exportateurs camerounais de safou (*Dacryodes edulis*) sur le marché sous régional et international. Profil, fonctionnement et stratégies de développement.
73. Impact of the Southeast Asian Network for Agroforestry Education (SEANAFE) on agroforestry education capacity.
74. Setting landscape conservation targets and promoting them through compatible land use in the Philippines.
75. Review of methods for researching multistrata systems.

76. Study on economical viability of *Jatropha curcas* L. plantations in Northern Tanzania assessing farmers' prospects via cost-benefit analysis
77. Cooperation in Agroforestry between Ministry of Forestry of Indonesia and International Center for Research in Agroforestry
78. "China's bioenergy future. an analysis through the Lens if Yunnan Province
79. Land tenure and agricultural productivity in Africa: A comparative analysis of the economics literature and recent policy strategies and reforms
80. Boundary organizations, objects and agents: linking knowledge with action in Agroforestry watersheds
81. Reducing emissions from deforestation and forest degradation (REDD) in Indonesia: options and challenges for fair and efficient payment distribution mechanisms

2009

82. Mainstreaming climate change into agricultural education: challenges and perspectives
83. Challenging conventional mindsets and disconnects in conservation: the emerging role of eco-agriculture in Kenya's landscape mosaics
84. Lesson learned RATA garut dan bengkurat: suatu upaya membedah kebijakan pelepasan kawasan hutan dan redistribusi tanah bekas kawasan hutan
85. The emergence of forest land redistribution in Indonesia
86. Commercial opportunities for fruit in Malawi
87. Status of fruit production processing and marketing in Malawi
88. Fraud in tree science
89. Trees on farm: analysis of global extent and geographical patterns of agroforestry
90. The springs of Nyando: water, social organization and livelihoods in Western Kenya
91. Building capacity toward region-wide curriculum and teaching materials development in agroforestry education in Southeast Asia
92. Overview of biomass energy technology in rural Yunnan (Chinese – English abstract)
93. A pro-growth pathway for reducing net GHG emissions in China
94. Analysis of local livelihoods from past to present in the central Kalimantan Ex-Mega Rice Project area
95. Constraints and options to enhancing production of high quality feeds in dairy production in Kenya, Uganda and Rwanda

2010

96. Agroforestry education in the Philippines: status report from the Southeast Asian Network for Agroforestry Education (SEANAFE)
97. Economic viability of *Jatropha curcas* L. plantations in Northern Tanzania- assessing farmers' prospects via cost-benefit analysis.
98. Hot spot of emission and confusion: land tenure insecurity, contested policies and competing claims in the central Kalimantan Ex-Mega Rice Project area
99. Agroforestry competences and human resources needs in the Philippines
100. CES/COS/CIS paradigms for compensation and rewards to enhance environmental Services

101. Case study approach to region-wide curriculum and teaching materials development in agroforestry education in Southeast Asia
102. Stewardship agreement to reduce emissions from deforestation and degradation (REDD): Lubuk Beringin's Hutan Desa as the first village forest in Indonesia
103. Landscape dynamics over time and space from ecological perspective
104. Komoditisasi atau koinvestasi jasa lingkungan: skema imbal jasa lingkungan program peduli sungai di DAS Way Besai, Lampung, Indonesia
105. Improving smallholders' rubber quality in Lubuk Beringin, Bungo district, Jambi province, Indonesia: an initial analysis of the financial and social benefits
106. Rapid Carbon Stock Appraisal (RACSA) in Kalahan, Nueva Vizcaya, Philippines
107. Tree domestication by ICRAF and partners in the Peruvian Amazon: lessons learned and future prospects in the domain of the Amazon Initiative eco-regional program
108. Memorias del Taller Nacional: "Iniciativas para Reducir la Deforestación en la region Andino - Amazónica", 09 de Abril del 2010. Proyecto REALU Peru
109. Percepciones sobre la Equidad y Eficiencia en la cadena de valor de REDD en Perú –Reporte de Talleres en Ucayali, San Martín y Loreto, 2009. Proyecto REALU-Perú.
110. Reducción de emisiones de todos los Usos del Suelo. Reporte del Proyecto REALU Perú Fase 1
111. Programa Alternativas a la Tumba-y-Quema (ASB) en el Perú. Informe Resumen y Síntesis de la Fase II. 2da. versión revisada
112. Estudio de las cadenas de abastecimiento de germoplasma forestal en la amazonía Boliviana
113. Biodiesel in the Amazon
114. Estudio de mercado de semillas forestales en la amazonía Colombiana
115. Estudio de las cadenas de abastecimiento de germoplasma forestal en Ecuador
<http://dx.doi.org/10.5716/WP10340.PDF>
116. How can systems thinking, social capital and social network analysis help programs achieve impact at scale?
117. Energy policies, forests and local communities in the Ucayali Region, Peruvian Amazon
118. NTFPs as a Source of Livelihood Diversification for Local Communities in the Batang Toru Orangutan Conservation Program
119. Studi Biodiversitas: Apakah agroforestry mampu mengkonservasi keanekaragaman hayati di DAS Konto?
120. Estimasi Karbon Tersimpan di Lahan-lahan Pertanian di DAS Konto, Jawa Timur
121. Implementasi Kaji Cepat Hidrologi (RHA) di Hulu DAS Brantas, Jawa Timur.
<http://dx.doi.org/10.5716/WP10338.PDF>
122. Kaji Cepat Hidrologi di Daerah Aliran Sungai Krueng Peusangan, NAD,Sumatra
<http://dx.doi.org/10.5716/WP10337.PDF>
123. A Study of Rapid Hydrological Appraisal in the Krueng Peusangan Watershed, NAD, Sumatra.
<http://dx.doi.org/10.5716/WP10339.PDF>

2011

124. An Assessment of farm timber value chains in Mt Kenya area, Kenya
125. A Comparative financial analysis of current land use systems and implications for the adoption of improved agroforestry in the East Usambaras, Tanzania
126. Agricultural monitoring and evaluation systems

127. Challenges and opportunities for collaborative landscape governance in the East Usambara Mountains, Tanzania
128. Transforming Knowledge to Enhance Integrated Natural Resource Management Research, Development and Advocacy in the Highlands of Eastern Africa
<http://dx.doi.org/10.5716/WP11084.PDF>
129. Carbon-forestry projects in the Philippines: potential and challenges The Mt Kitanglad Range forest-carbon development <http://dx.doi.org/10.5716/WP11054.PDF>
130. Carbon forestry projects in the Philippines: potential and challenges. The Arakan Forest Corridor forest-carbon project. <http://dx.doi.org/10.5716/WP11055.PDF>
131. Carbon-forestry projects in the Philippines: potential and challenges. The Laguna Lake Development Authority's forest-carbon development project.
<http://dx.doi.org/10.5716/WP11056.PDF>
132. Carbon-forestry projects in the Philippines: potential and challenges. The Quirino forest-carbon development project in Sierra Madre Biodiversity Corridor
<http://dx.doi.org/10.5716/WP11057.PDF>
133. Carbon-forestry projects in the Philippines: potential and challenges. The Ikalahan Ancestral Domain forest-carbon development <http://dx.doi.org/10.5716/WP11058.PDF>
134. The Importance of Local Traditional Institutions in the Management of Natural Resources in the Highlands of Eastern Africa. <http://dx.doi.org/10.5716/WP11085.PDF>
135. Socio-economic assessment of irrigation pilot projects in Rwanda.
<http://dx.doi.org/10.5716/WP11086.PDF>
136. Performance of three rambutan varieties (*Nephelium lappaceum* L.) on various nursery media.
<http://dx.doi.org/10.5716/WP11232.PDF>
137. Climate change adaptation and social protection in agroforestry systems: enhancing adaptive capacity and minimizing risk of drought in Zambia and Honduras
<http://dx.doi.org/10.5716/WP11269.PDF>
138. Does value chain development contribute to rural poverty reduction? Evidence of asset building by smallholder coffee producers in Nicaragua
<http://dx.doi.org/10.5716/WP11271.PDF>
139. Potential for biofuel feedstock in Kenya. <http://dx.doi.org/10.5716/WP11272.PDF>
140. Impact of fertilizer trees on maize production and food security in six districts of Malawi.
<http://dx.doi.org/10.5716/WP11281.PDF>

2012

141. Fortalecimiento de capacidades para la gestión del Santuario Nacional Pampa Hermosa: Construyendo las bases para un manejo adaptativo para el desarrollo local. Memorias del Proyecto. <http://dx.doi.org/10.5716/WP12005.PDF>
142. Understanding rural institutional strengthening: A cross-level policy and institutional framework for sustainable development in Kenya <http://dx.doi.org/10.5716/WP12012.PDF>
143. Climate change vulnerability of agroforestry <http://dx.doi.org/10.5716/WP16722.PDF>
144. Rapid assesment of the inner Niger delta of Mali <http://dx.doi.org/10.5716/WP12021.PDF>
145. Designing an incentive program to reduce on-farm deforestation in the East Usambara Mountains, Tanzania <http://dx.doi.org/10.5716/WP12048.PDF>
146. Extent of adoption of conservation agriculture and agroforestry in Africa: the case of Tanzania, Kenya, Ghana, and Zambia <http://dx.doi.org/10.5716/WP12049.PDF>

147. Policy incentives for scaling up conservation agriculture with trees in Africa: the case of Tanzania, Kenya, Ghana and Zambia <http://dx.doi.org/10.5716/WP12050.PDF>
148. Commoditized or co-invested environmental services? Rewards for environmental services scheme: River Care program Way Besai watershed, Lampung, Indonesia. <http://dx.doi.org/10.5716/WP12051.PDF>
149. Assessment of the headwaters of the Blue Nile in Ethiopia. <http://dx.doi.org/10.5716/WP12160.PDF>
150. Assessment of the uThukela Watershed, Kwazulu. <http://dx.doi.org/10.5716/WP12161.PDF>
151. Assessment of the Oum Zessar Watershed of Tunisia. <http://dx.doi.org/10.5716/WP12162.PDF>
152. Assessment of the Ruwenzori Mountains in Uganda. <http://dx.doi.org/10.5716/WP12163.PDF>
153. History of agroforestry research and development in Viet Nam. Analysis of research opportunities and gaps. <http://dx.doi.org/10.5716/WP12052.PDF>
154. REDD+ in Indonesia: a Historical Perspective. <http://dx.doi.org/10.5716/WP12053.PDF>
155. Agroforestry and Forestry in Sulawesi series: Livelihood strategies and land use system dynamics in South Sulawesi <http://dx.doi.org/10.5716/WP12054.PDF>
156. Agroforestry and Forestry in Sulawesi series: Livelihood strategies and land use system dynamics in Southeast Sulawesi. <http://dx.doi.org/10.5716/WP12055.PDF>
157. Agroforestry and Forestry in Sulawesi series: Profitability and land-use systems in South and Southeast Sulawesi. <http://dx.doi.org/10.5716/WP12056.PDF>
158. Agroforestry and Forestry in Sulawesi series: Gender, livelihoods and land in South and Southeast Sulawesi <http://dx.doi.org/10.5716/WP12057.PDF>
159. Agroforestry and Forestry in Sulawesi series: Agroforestry extension needs at the community level in AgFor project sites in South and Southeast Sulawesi, Indonesia. <http://dx.doi.org/10.5716/WP12058.PDF>
160. Agroforestry and Forestry in Sulawesi series: Rapid market appraisal of agricultural, plantation and forestry commodities in South and Southeast Sulawesi. <http://dx.doi.org/10.5716/WP12059.PDF>

2013

161. Diagnosis of farming systems in the Agroforestry for Livelihoods of Smallholder farmers in Northwestern Viet Nam project <http://dx.doi.org/10.5716/WP13033.PDF>
162. Ecosystem vulnerability to climate change: a literature review. <http://dx.doi.org/10.5716/WP13034.PDF>
163. Local capacity for implementing payments for environmental services schemes: lessons from the RUPES project in northeastern Viet Nam <http://dx.doi.org/10.5716/WP13046.PDF>
164. Seri Agroforestri dan Kehutanan di Sulawesi: Agroforestri dan Kehutanan di Sulawesi: Strategi mata pencaharian dan dinamika sistem penggunaan lahan di Sulawesi Selatan <http://dx.doi.org/10.5716/WP13040.PDF>
165. Seri Agroforestri dan Kehutanan di Sulawesi: Mata pencaharian dan dinamika sistem penggunaan lahan di Sulawesi Tenggara <http://dx.doi.org/10.5716/WP13041.PDF>
166. Seri Agroforestri dan Kehutanan di Sulawesi: Profitabilitas sistem penggunaan lahan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara <http://dx.doi.org/10.5716/WP13042.PDF>
167. Seri Agroforestri dan Kehutanan di Sulawesi: Gender, mata pencarian dan lahan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara <http://dx.doi.org/10.5716/WP13043.PDF>

168. Seri Agroforestri dan Kehutanan di Sulawesi: Kebutuhan penyuluhan agroforestri pada tingkat masyarakat di lokasi proyek AgFor di Sulawesi Selatan dan Tenggara, Indonesia.
<http://dx.doi.org/10.5716/WP13044.PDF>
169. Seri Agroforestri dan Kehutanan di Sulawesi: Laporan hasil penilaian cepat untuk komoditas pertanian, perkebunan dan kehutanan di Sulawesi Selatan dan Tenggara
<http://dx.doi.org/10.5716/WP13045.PDF>
170. Agroforestry, food and nutritional security <http://dx.doi.org/10.5716/WP13054.PDF>
171. Stakeholder Preferences over Rewards for Ecosystem Services: Implications for a REDD+ Benefit Distribution System in Viet Nam <http://dx.doi.org/10.5716/WP13057.PDF>
172. Payments for ecosystem services schemes: project-level insights on benefits for ecosystems and the rural poor <http://dx.doi.org/10.5716/WP13001.PDF>
173. Good practices for smallholder teak plantations: keys to success
<http://dx.doi.org/10.5716/WP13246.PDF>
174. Market analysis of selected agroforestry products in the Vision for Change Project intervention Zone, Côte d'Ivoire <http://dx.doi.org/10.5716/WP13249.PDF>
175. Rattan futures in Katingan: why do smallholders abandon or keep their gardens in Indonesia's 'rattan district'? <http://dx.doi.org/10.5716/WP13251.PDF>
176. Management along a gradient: the case of Southeast Sulawesi's cacao production landscapes
<http://dx.doi.org/10.5716/WP13265.PDF>

2014

177. Are trees buffering ecosystems and livelihoods in agricultural landscapes of the Lower Mekong Basin? Consequences for climate-change adaptation. <http://dx.doi.org/10.5716/WP14047.PDF>
178. Agroforestry, livestock, fodder production and climate change adaptation and mitigation in East Africa: issues and options. <http://dx.doi.org/10.5716/WP14050.PDF>
179. Trees on farms: an update and reanalysis of agroforestry's global extent and socio-ecological characteristics. <http://dx.doi.org/10.5716/WP14064.PDF>
180. Beyond reforestation: an assessment of Vietnam's REDD+ readiness.
<http://dx.doi.org/10.5716/WP14097.PDF>
181. Farmer-to-farmer extension in Kenya: the perspectives of organizations using the approach.
<http://dx.doi.org/10.5716/WP14380.PDF>
182. Farmer-to-farmer extension in Cameroon: a survey of extension organizations.
<http://dx.doi.org/10.5716/WP14383.PDF>
183. Farmer-to-farmer extension approach in Malawi: a survey of organizations: a survey of organizations <http://dx.doi.org/10.5716/WP14391.PDF>
184. Seri Agroforestri dan Kehutanan di Sulawesi: Kuantifikasi jasa lingkungan air dan karbon pola agroforestri pada hutan rakyat di wilayah sungai Jeneberang
185. Options for Climate-Smart Agriculture at Kaptumo Site in Kenya <http://dx.doi.org/10.5716/WP14394.PDF>

2015

186. Agroforestry for Landscape Restoration and Livelihood Development in Central Asia
<http://dx.doi.org/10.5716/WP14143.PDF>

187. "Projected Climate Change and Impact on Bioclimatic Conditions in the Central and South-Central Asia Region" <http://dx.doi.org/10.5716/WP14144.PDF>
188. Land Cover Changes, Forest Loss and Degradation in Kutai Barat, Indonesia. <http://dx.doi.org/10.5716/WP14145.PDF>
189. The Farmer-to-Farmer Extension Approach in Malawi: A Survey of Lead Farmers. <http://dx.doi.org/10.5716/WP14152.PDF>
190. Evaluating indicators of land degradation and targeting agroforestry interventions in smallholder farming systems in Ethiopia. <http://dx.doi.org/10.5716/WP14252.PDF>
191. Land health surveillance for identifying land constraints and targeting land management options in smallholder farming systems in Western Cameroon
192. Land health surveillance in four agroecologies in Malawi
193. Cocoa Land Health Surveillance: an evidence-based approach to sustainable management of cocoa landscapes in the Nawa region, South-West Côte d'Ivoire <http://dx.doi.org/10.5716/WP14255.PDF>
194. Situational analysis report: Xishuangbanna autonomous Dai Prefecture, Yunnan Province, China. <http://dx.doi.org/10.5716/WP14255.PDF>
195. Farmer-to-farmer extension: a survey of lead farmers in Cameroon. <http://dx.doi.org/10.5716/WP15009.PDF>
196. From transition fuel to viable energy source Improving sustainability in the sub-Saharan charcoal sector <http://dx.doi.org/10.5716/WP15011.PDF>
197. Mobilizing Hybrid Knowledge for More Effective Water Governance in the Asian Highlands <http://dx.doi.org/10.5716/WP15012.PDF>
198. Water Governance in the Asian Highlands <http://dx.doi.org/10.5716/WP15013.PDF>
199. Assessing the Effectiveness of the Volunteer Farmer Trainer Approach in Dissemination of Livestock Feed Technologies in Kenya vis-à-vis other Information Sources <http://dx.doi.org/10.5716/WP15022.PDF>
200. The rooted pedon in a dynamic multifunctional landscape: Soil science at the World Agroforestry Centre <http://dx.doi.org/10.5716/WP15023.PDF>
201. Characterising agro-ecological zones with local knowledge. Case study: Huong Khe district, Ha Tinh, Viet Nam <http://dx.doi.org/10.5716/WP15050.PDF>
202. Looking back to look ahead: Insight into the effectiveness and efficiency of selected advisory approaches in the dissemination of agricultural technologies indicative of Conservation Agriculture with Trees in Machakos County, Kenya. <http://dx.doi.org/10.5716/WP15065.PDF>
203. Pro-poor Biocarbon Projects in Eastern Africa Economic and Institutional Lessons. <http://dx.doi.org/10.5716/WP15022.PDF>
204. Projected climate change impacts on climatic suitability and geographical distribution of banana and coffee plantations in Nepal. <http://dx.doi.org/10.5716/WP15294.PDF>
205. Agroforestry and Forestry in Sulawesi series: Smallholders' coffee production and marketing in Indonesia. A case study of two villages in South Sulawesi Province. <http://dx.doi.org/10.5716/WP15690.PDF>
206. Mobile phone ownership and use of short message service by farmer trainers: a case study of Olkalou and Kaptumo in Kenya <http://dx.doi.org/10.5716/WP15691.PDF>
207. Associating multivariate climatic descriptors with cereal yields: a case study of Southern Burkina Faso <http://dx.doi.org/10.5716/WP15273.PDF>
208. Preferences and adoption of livestock feed practices among farmers in dairy management groups in Kenya <http://dx.doi.org/10.5716/WP15675.PDF>

209. Scaling up climate-smart agriculture: lessons learned from South Asia and pathways for success <http://dx.doi.org/10.5716/WP15720.PDF>
210. Agroforestry and Forestry in Sulawesi series: Local perceptions of forest ecosystem services and collaborative formulation of reward mechanisms in South and Southeast Sulawesi <http://dx.doi.org/10.5716/WP15721.PDF>
211. Potential and challenges in implementing the co-investment of ecosystem services scheme in Buol District, Indonesia. <http://dx.doi.org/10.5716/WP15722.PDF>
212. Tree diversity and its utilization by the local community in Buol District, Indonesia <http://dx.doi.org/10.5716/WP15723.PDF>
213. Vulnerability of smallholder farmers and their preferences on farming practices in Buol District, Indonesia <http://dx.doi.org/10.5716/WP15724.PDF>
214. Dynamics of Land Use/Cover Change and Carbon Emission in Buol District, Indonesia <http://dx.doi.org/10.5716/WP15725.PDF>
215. Gender perspective in smallholder farming practices in Lantapan, Phillippines. <http://dx.doi.org/10.5716/WP15726.PDF>
216. Vulnerability of smallholder farmers in Lantapan, Bukidnon. <http://dx.doi.org/10.5716/WP15727.PDF>
217. Vulnerability and adaptive capacity of smallholder farmers in Ho Ho Sub-watershed, Ha Tinh Province, Vietnam <http://dx.doi.org/10.5716/WP15728.PDF>
218. Local Knowledge on the role of trees to enhance livelihoods and ecosystem services in northern central Vietnam <http://dx.doi.org/10.5716/WP15729.PDF>
219. Land-use/cover change in Ho Ho Sub-watershed, Ha Tinh Province, Vietnam. <http://dx.doi.org/10.5716/WP15730.PDF>

2016

220. Agroforestry and Forestry in Sulawesi series: Evaluation of the Agroforestry Farmer Field Schools on agroforestry management in South and Southeast Sulawesi, Indonesia. <http://dx.doi.org/10.5716/WP16002.PDF>
221. Farmer-to-farmer extension of livestock feed technologies in Rwanda: A survey of volunteer farmer trainers and organizations. <http://dx.doi.org/10.5716/WP16005.PDF>
222. Projected Climate Change Impact on Hydrology, Bioclimatic Conditions, and Terrestrial Ecosystems in the Asian Highlands <http://dx.doi.org/10.5716/WP16006.PDF>
223. Adoption of Agroforestry and its impact on household food security among farmers in Malawi <http://dx.doi.org/10.5716/WP16013.PDF>
224. Agroforestry and Forestry in Sulawesi series: Information channels for disseminating innovative agroforestry practices to villages in Southern Sulawesi, Indonesia <http://dx.doi.org/10.5716/WP16034.PDF>
225. Agroforestry and Forestry in Sulawesi series: Unravelling rural migration networks. Land-tenure arrangements among Bugis migrant communities in Southeast Sulawesi. <http://dx.doi.org/10.5716/WP16035.PDF>
226. Agroforestry and Forestry in Sulawesi series: Women's participation in agroforestry: more benefit or burden? A gendered analysis of Gorontalo Province. <http://dx.doi.org/10.5716/WP16036.PDF>
227. Kajian Kelayakan dan Pengembangan Desain Teknis Rehabilitasi Pesisir di Sulawesi Tengah. <http://dx.doi.org/10.5716/WP16037.PDF>
228. Selection of son tra clones in North West Vietnam. <http://dx.doi.org/10.5716/WP16038.PDF>

229. Growth and fruit yield of seedlings, cuttings and grafts from selected son tra trees in Northwest Vietnam <http://dx.doi.org/10.5716/WP16046.PDF>
230. Gender-Focused Analysis of Poverty and Vulnerability in Yunnan, China <http://dx.doi.org/10.5716/WP16071.PDF>
231. Seri Agroforestri dan Kehutanan di Sulawesi: Kebutuhan Penyuluhan Agroforestri untuk Rehabilitasi Lahan di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. <http://dx.doi.org/10.5716/WP16077.PDF>
232. Agroforestry and Forestry in Sulawesi series: Agroforestry extension needs for land rehabilitation in East Sumba, East Nusa Tenggara, Indonesia. <http://dx.doi.org/10.5716/WP16078.PDF>
233. Central hypotheses for the third agroforestry paradigm within a common definition. <http://dx.doi.org/10.5716/WP16079.PDF>
234. Assessing smallholder farmers' interest in shade coffee trees: The Farming Systems of Smallholder Coffee Producers in the Gisenyi Area, Rwanda: a participatory diagnostic study. <http://dx.doi.org/10.5716/WP16104.PDF>
235. Review of agricultural market information systems in |sub-Saharan Africa. <http://dx.doi.org/10.5716/WP16110.PDF>
236. Vision and road map for establishment of a protected area in Lag Badana, Lower Jubba, Somalia. <http://dx.doi.org/10.5716/WP16127.PDF>
237. Replicable tools and frameworks for Bio-Carbon Development in West Africa. <http://dx.doi.org/10.5716/WP16138.PDF>
238. Existing Conditions, Challenges and Needs in the Implementation of Forestry and Agroforestry Extension in Indonesia. <http://dx.doi.org/10.5716/WP16141.PDF>
239. Situasi Terkini, Tantangan dan Kebutuhan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Agroforestri di Indonesia. <http://dx.doi.org/10.5716/WP16142.PDF>
240. The national agroforestry policy of India: experiential learning in development and delivery phases. <http://dx.doi.org/10.5716/WP16143.PDF>
241. Agroforestry and Forestry in Sulawesi series: Livelihood strategies and land-use system dynamics in Gorontalo. <http://dx.doi.org/10.5716/WP16157.PDF>
242. Seri Agroforestri dan Kehutanan di Sulawesi: Strategi mata pencaharian dan dinamika sistem penggunaan lahan di Gorontalo. <http://dx.doi.org/10.5716/WP16158.PDF>
243. Ruang, Gender dan Kualitas Hidup Manusia: Sebuah studi Gender pada komunitas perantau dan pengelola kebun di Jawa Barat. <http://dx.doi.org/10.5716/WP16159.PDF>

The World Agroforestry Centre is an autonomous, non-profit research organization whose vision is a rural transformation in the developing world as smallholder households increase their use of trees in agricultural landscapes to improve food security, nutrition, income, health, shelter, social cohesion, energy resources and environmental sustainability. The Centre generates science-based knowledge about the diverse roles that trees play in agricultural landscapes, and uses its research to advance policies and practices, and their implementation that benefit the poor and the environment. It aims to ensure that all this is achieved by enhancing the quality of its science work, increasing operational efficiency, building and maintaining strong partnerships, accelerating the use and impact of its research, and promoting greater cohesion, interdependence and alignment within the organization.



United Nations Avenue, Gigiri • PO Box 30677 • Nairobi, 00100 • Kenya
Telephone: +254 20 7224000 or via USA +1 650 833 6645
Fax: +254 20 7224001 or via USA +1 650 833 6646
Email: worldagroforestry@cgiar.org • www.worldagroforestry.org

Southeast Asia Regional Program • Sindang Barang • Bogor 16680
PO Box 161 • Bogor 16001 • Indonesia
Telephone: +62 251 8625415 • Fax: +62 251 8625416
Email: icraf-indonesia@cgiar.org • www.worldagroforestry.org/region/southeast-asia